



**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
ANGKA KEMISKINAN MELALUI PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2015-2019**

Tesis

Oleh

Dya Ayu Fitaloka Candra Kartika S.E
NIM. 160820201016

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi suatu problem yang banyak dialami oleh negara-negara diberbagai belahan dunia khususnya di negara yang sedang berkembang. Kemiskinan menjadi masalah yang serius dan fundamental sehingga memerlukan penanganan yang tepat sasaran. Kemiskinan tidak hanya berada dalam perspektif ekonomi saja, kemiskinan tidak juga hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, juga tidak hanya terkait dengan rendahnya tingkat konsumsi, melainkan kemiskinan bersifat kompleks yakni masalah kemiskinan berdampak pada berbagai aspek, sehingga kemiskinan dapat memicu terjadinya gap atau kesenjangan antara aspek ekonomi dan non ekonomi, dengan demikian akan terjadi suatu kondisi ketidakstabilan di berbagai aspek kehidupan.

Menurut Ala (1981 dalam Arsyad, 1992:69) kemiskinan itu adalah bersifat multidimensional yakni yang artinya berhubungan dengan beranekaragamnya kebutuhan manusia maka kemiskinan juga dapat dilihat dari berbagai aspek yakni kebijaksanaan umum dalam hal ini kemiskinan terdiri dari berbagai aspek primer yakni yang berupa miskin akan aset-aset, organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan, kemudian aspek sekunder yakni berupa miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi yang dalam hal ini dimensi-dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan kedalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang tidak sehat, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan kurangnya akses terhadap pendidikan. Dengan kata lain, kemiskinan bersifat multidimensional yaitu penyebab dan penggolongan kriteria miskin tidak hanya diukur dari satu sudut pandang melainkan dapat diukur dari berbagai macam sudut pandang yakni dari perspektif ekonomi dan perspektif non ekonomi seperti dari sisi sosial, hukum, budaya, pendidikan, kesehatan, ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan lain sebagainya.

Indonesia termasuk negara sedang berkembang yang memiliki jumlah penduduk tergolong besar. Sebagai negara sedang berkembang, Indonesia tidak terlepas dari masalah kemiskinan dimana tercermin ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memenuhi tuntutan hidupnya pada suatu taraf yang dianggap manusiawi, khususnya aspek konsumsi dan pendapatan. Pembangunan ekonomi pada suatu negara adalah langkah yang digunakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan pembangunan ekonomi maka diharapkan kondisi perekonomian dan stabilitas perekonomian akan semakin meningkat. Pembangunan

merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta menjadi sarana menyejahterakan masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah terus naik dari tahun ke tahun dengan harapan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tingkat kemiskinan. Pengeluaran pemerintah juga tidak hanya melihat jumlahnya saja tapi juga melihat ketepatan sasaran dalam pengeluaran pemerintah (Osinubi, 2005). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 2002). Terkait dengan kebijakan pengeluaran pemerintah, kebijakan belanja sektor publik yang dilakukan di suatu negara, baik negara berbentuk kesatuan maupun federasi yang menganut azas pembagian kekuasaan dan wewenang secara vertical, khususnya di Indonesia akan berimplikasi pada terciptanya hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan penyelenggaraan negara dan pemerintahan atau dengan kata lain penyelenggaraan dan perencanaan kekuasaan yang terdistribusi kedalam satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil dan dalam praktiknya diwujudkan dalam bentuk desentralisasi teritorial, satuan otonomi teritorial atau federal. Terjadinya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam perundang-undangan dan diawasi pelaksanaannya (Djaenuri, 2012:19-20).

Adanya otonomi daerah dimulai pada 1 Januari 2001 dalam hal ini pemerintah pusat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah diberikan kepada seluruh wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagai wujud dari aplikasi azas desentralisasi. Dilaksanakannya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal karena dilandasi oleh pemikiran bahwa daerah memiliki peranan yang penting untuk peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat serta memberikan alternatif bagi pemerataan pembangunan nasional, hal ini dikarenakan daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan masyarakatnya selain itu daerah juga dapat lebih mengenal dan mengetahui potensi yang dimilikinya, sehingga dengan dilaksanakannya otonomi daerah dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dana desentralisasi yang digelontorkan oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi di daerah dalam hal ini secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh

pembangunan manusia sehingga dalam penyusunan anggaran diperlukan prioritas untuk peningkatan pembangunan manusia (Adi, 2009). Adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka diharapkan daerah dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan memerhatikan potensi yang dimilikinya dengan meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan sumber daya yang ada guna mencapai pemerataan ekonomi dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengantisipasi tantangan dalam persaingan global. Dalam hal ini daerah harus memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi untuk memajukan wilayahnya dan bersaing dengan wilayah lain untuk pencapaian kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat di wilayahnya.

Berdasarkan hal diatas pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang terkait dengan menjalankan roda pemerintahan maupun pembiayaan terhadap kegiatan perekonomian, dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan untuk menggerakkan dan memberikan stimulus agar perekonomian dapat berjalan dengan lancar dalam hal ini peranan pemerintah adalah untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi agar dapat dimanfaatkan dengan optimal sehingga dapat tercapai efisiensi ekonomi (peran alokatif), pemerintah juga berperan untuk mendistribusikan sumber daya dan hasil-hasil ekonomi secara merata (peran distributive), selain itu pemerintah juga berperan untuk menjaga stabilitas perekonomian agar tercipta keseimbangan/equilibrium dan juga berkewajiban untuk melakukan pemulihan jika terjadi kondisi ketidakseimbangan/disequilibrium (peran stabilisatif), yang terakhir adalah pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan rangsangan agar tercipta pembangunan ekonomi yang optimal (peran dinamisatif) (Dumairy, 1996:157-158).

Pada dasarnya tujuan adanya azas desentralisasi atau adanya hubungan keuangan pusat-daerah adalah untuk memberikan wadah agar kemampuan fiskal pemerintah daerah lebih memadai. Hal ini dikarenakan pada umumnya kapasitas fiskal daerah rendah, sedangkan kebutuhan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat dan melaksanakan pembangunan adalah lebih tinggi daripada kapasitas fiskal daerah, sehingga diperlukan pola bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan di daerah dan pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan merata (Djaenuri, 2012:45). Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan strategi yang bertujuan untuk merespon tuntutan masyarakat akan berbagi kekuatan (*sharing of powers*), distribusi pendapatan dan kemandirian sistem manajemen di daerah, selain strategi tersebut terdapat strategi yang lain yakni untuk

memperkuat perekonomian daerah guna mencapai kemakmuran rakyat. Oleh karena itu pengelolaan aset dan keuangan serta anggaran daerah harus dikelola dengan baik karena pada dasarnya anggaran daerah sebagai alat perencanaan pengeluaran dan penerimaan daerah selama setahun, merupakan kontrol terhadap pengeluaran daerah guna peningkatan dan pengembangan kapabilitas daerah untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien guna mewujudkan kesejahteraan rakyat (Aditia, 2018).

Peran pemerintah diperlukan dalam upaya mengentaskan masalah kemiskinan, melalui intervensi pemerintah diharapkan dapat memberikan stimulus atau rangsangan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi sehingga tercipta keadilan baik antar lapisan masyarakat maupun antar daerah. Dengan terciptanya keadilan ekonomi akan mengurangi bahkan mengangulangi terjadinya kesenjangan antar masyarakat bahkan memerani kemiskinan. Peran lainnya yang tak kalah penting adalah untuk meningkatkan kualitas modal manusia Indonesia, hal ini sangat penting mengingat bahwa sumber daya manusia merupakan sebuah agen pembangunan di suatu negara. Sehingga semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka sumber daya ekonomi dan sumber-sumber lain dapat dikelola dengan baik dalam rangka mencapai kemakmuran.

Tujuan mendasar pembangunan ekonomi yang hendak dicapai oleh suatu bangsa adalah pendidikan dan kesehatan. Kesehatan merupakan hal pokok dalam pencapaian kesejahteraan karena merupakan syarat utama guna meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu kesehatan juga harus diimbangi dengan pendidikan yang layak. Pendidikan memainkan peranan penting bagi sebuah negara terutama negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dalam rangka mengembangkan kapasitas dan meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia agar tercipta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini distribusi pendidikan dan kesehatan juga penting selain pentingnya distribusi pendapatan adanya peningkatan pendidikan dan kesehatan adalah sebuah jalan keluar atas jebakan lingkaran setan kemiskinan (Todaro, 2003:404-406).

Pendidikan dan kesehatan merupakan komponen penting dalam aspek pembangunan ekonomi. Dalam hal ini modal yang digunakan untuk peningkatan kualitas kesehatan dapat meningkatkan tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk investasi pendidikan. Sedangkan modal yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk investasi kesehatan. Terdapat hubungan kausalitas antara pendidikan, kesehatan dengan pendapatan. Pada umumnya di negara yang memiliki pendapatan perkapita tinggi memiliki tingkat pendidikan

dan kesehatan yang baik. Hal ini dikarenakan dengan pendapatan yang tinggi baik masyarakat maupun pemerintah dapat membiayai biaya pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan akan diimbangi dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan sehingga dengan adanya hal ini maka kebijakan pembangunan difokuskan dalam rangka peningkatan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan secara simultan (Todaro, 2003:406-411). Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau dengan kata lain kebijakan pemerintah melakukan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan modal manusia (*human capital*) dapat ditempuh dengan memberikan stimulus yakni berupa pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi untuk meningkatkan modal manusia. Pelaksanaan kebijakan tersebut tentunya diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara terkait.

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta pengentasan kemiskinan maka pemerintah salah satunya menggunakan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan mengalokasikan dana dan anggaran ke bidang fasilitas publik yang menjadi indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur atau pengeluaran dibidang ekonomi dan lain sebagainya. Pengeluaran pemerintah yang diarahkan ke bidang pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih terdidik dan memiliki skill sehingga sangat potensial di dunia kerja dan akan berimplikasi terhadap peningkatan produktivitas kerja, dengan peningkatan produktivitas kerja maka akan berimbas pada peningkatan pendapatan tenaga kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dan kesejahteraan dapat tercapai. Kurniawan (2016) menyatakan bahwa pendidikan merupakan alternatif untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup. Pengeluaran di bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup, menurunkan angka kematian bayi dan ibu hamil (Sahrah, 2007). Selain itu terdapat komposisi pengeluaran pemerintah terhadap anggaran infrastruktur yang diharapkan mampu memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas yang akan berimbas pada peningkatan konsumsi riil perkapita (Dellavallade, 2006).

Jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan kemampuan intelektual dan *skill* yang tinggi akan menjadi suatu bonus demografi yang memberikan dampak positif bagi

kemajuan ekonomi di negara tersebut namun jika tidak diimbangi dengan kemampuan intelektual yang tinggi dan *skill* maka akan menjadi ancaman demografi bagi suatu negara. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia adalah elemen yang penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka dapat dijadikan sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan ekonomi suatu negara guna mencapai perkembangan yang progresif untuk mencapai kesejahteraan. Sumber daya manusia merupakan suatu aset yang berfungsi sebagai pengelola faktor-faktor produksi yang ada agar memiliki nilai guna lebih. Sehingga dengan kemampuan sumber daya manusia yang baik atau dengan kata lain dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka kemampuan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara akan semakin baik pula sehingga akan tercapai efisiensi dan efektivitas untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang optimal di suatu negara. Pembangunan manusia merupakan investasi modal manusia dalam rangka pembangunan nasional atau daerah (Aditia,2018). Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam hal ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia maka diperlukan intervensi pemerintah, langkah konkrit pemerintah untuk meningkatkan pembangunan manusia Indonesia ditempuh melalui pengeluaran pemerintah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan dengan berbagai program, oleh berbagai sektor dan dengan kriteria sasaran yang berbeda-beda. Dengan demikian pelaksanaan paket kegiatannya berjalan mengedepankan konsep sektoral, sehingga tidak terintegrasi, bersinergi dan terkoordinasi. Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek-proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Peran aktif pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan juga tidak lepas dari jumlah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Berikut pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi untuk periode 2015-2009.

Tabel 1.1 Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Jawa Timur 2015-2019 (dalam Milyar Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Di Bidang Pendidikan	Pengeluaran Di Bidang Kesehatan	Pengeluaran Di Bidang Ekonomi
2015	544,12	2.958,32	2.798,43
2016	251,20	3.344,15	1.910,97
2017	1.707,76	3.064,81	2.393,38
2018	1.825,14	3.167,28	2.471,97
2019	1.886,11	3.338,06	2.184,76

Sumber: djpk.kemenkeu.go.id

Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk tertinggi setelah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menyatakan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar di Indonesia diikuti Jawa Tengah dan selanjutnya Jawa Barat. Data jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

Tahun	Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)		Total Penduduk Miskin Miskin (Ribuan Jiwa)
	Desa	Kota	
2015	3.204,82	1.571,15	4.775,97
2016	3.085,76	1.552,77	4.638,53
2017	2.949,82	1.455,45	4.405,27
2018	2.874,97	1.457,61	4.332,59
2019	2.617,85	1.438,15	4.056,00

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 2015-2019 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel penduduk miskin Provinsi Jawa Timur, 2015-2019 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur di desa lebih tinggi dibandingkan dengan di kota. Data juga menunjukkan bahwa penduduk miskin di Jawa Timur hampir setiap tahun mengalami penurunan, hanya pada tahun 2015 mengalami peningkatan, penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur paling signifikan terjadi pada tahun 2009 yakni sebesar 628.710 jiwa. Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih besar daripada jumlah penduduk miskin diperkotaan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yakni rendahnya desaan.

Provinsi Jawa Timur dengan penduduk miskin terbesar di Indonesia juga memiliki rasio gini yang cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional gini rasio penduduk di Jawa Timur mengalami fluktuasi dan memiliki angka gini rasio yang cukup tinggi artinya bahwa ketidakmerataan atau ketimpangan masyarakat Jawa Timur tinggi. Data gini rasio Provinsi Jawa Timur disajikan dalam grafik 1.3 sebagai berikut:

Gini Rasio Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

Grafik 1.1 Gini Rasio Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional Tahun 2019

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa gini rasio penduduk perkotaan di Jawa Timur tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, kondisi ketidakmerataan atau kesenjangan tertinggi terjadi pada tahun 2017 adalah sebesar 0,442 dan kondisi pemerataan paling tinggi terjadi pada tahun 2009 dengan gini rasio sebesar 0,333. Namun gini rasio di perkotaan Jawa Timur masih tergolong tinggi artinya ketimpangan di perkotaan Jawa Timur masih tinggi. Selain itu angka gini rasio penduduk pedesaan di Jawa Timur tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, gini rasio di wilayah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan gini rasio perkotaan di Jawa Timur tahun 2015-2019 artinya ketimpangan di kota jauh lebih besar daripada ketimpangan di pedesaan dengan kata lain di pedesaan. Dalam hal ini ketimpangan di Jawa Timur tergolong dapat dikatakan tinggi, sehingga memerlukan kebijakan yang tepat untuk menanganinya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus bisa mendorong dan menjalankan program kegiatan yang fokus untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Merujuk dari data kemiskinan dan ketimpangan diatas dapat dikatakan angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia masih tergolong tinggi, selain itu, Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar namun disisi lain baik secara tingkat nasional maupun Provinsi terdapat penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Apabila dilihat dari data BPS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur berada pada 15 pada Tahun 2019 dengan nilai 71,50. Nilai ini masih jauh dibawah provinsi DKI Jakarta yang merupakan peringkat pertama dengan IPM 80,76 (www.bps.go.id). Berikut data perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur Tahun 2015-2019.

Tabel 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

Tahun	IPM		Peringkat IPM Jawa Timur
	Jawa Timur	DKI Jakarta	
2015	68,95	78,99	15
2016	69,74	79,60	15
2017	70,27	80,06	15
2018	70,27	80,47	15
2019	70,27	80,76	15

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 2015-2019 (Data Diolah)

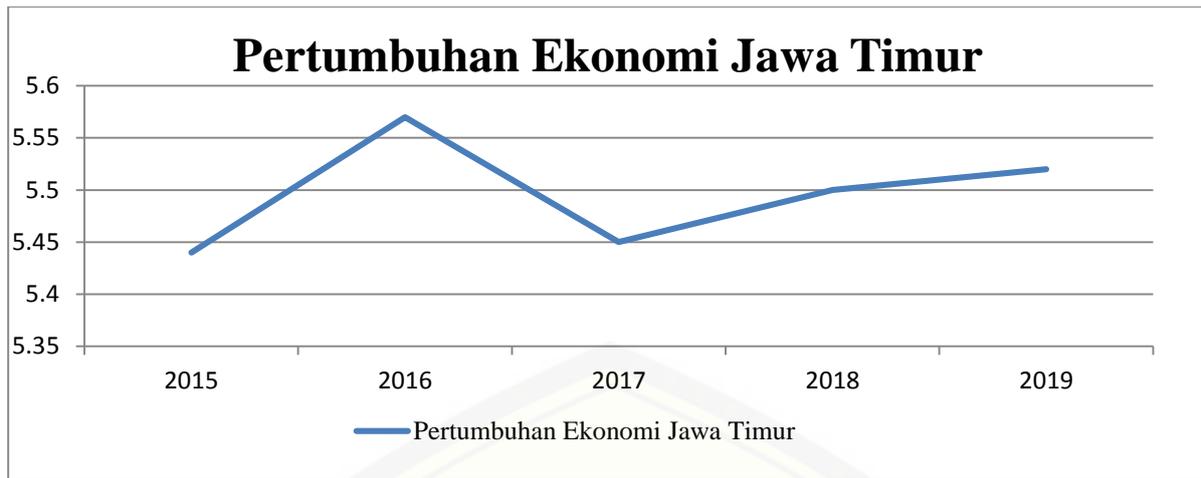
Keterangan: Mulai Tahun 2010 Perhitungan IPM menggunakan Metode Baru

Pemerintah memiliki tanggung jawab dan berperan aktif untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan, peran pemerintah ini berkaitan dengan tanggung jawab, fungsi dan wewenang pemerintah untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya dan meratakan hasil-hasil pembangunan ekonomi agar tercipta keadilan ekonomi dan mengurangi kesenjangan. Peranan pemerintah tidak hanya berfokus pada kepentingan pemerintahan nasional saja namun juga pemerataan pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang ketentuannya telah diatur dalam perundang-undangan. Teori lingkaran setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) dalam Suartha (2013) menyatakan bahwa *“a poor country is poor because it is poor”* yang bermakna bahwa suatu negara miskin itu miskin karena ia miskin. Menurut Ragnar Nurkse kemiskinan yang terjadi di suatu negara disebabkan oleh adanya ketidaksempurnaan pasar dan adanya keterbelakangan yang berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga memicu terjadinya penurunan bahkan rendahnya produktivitas kerja. Produktivitas kerja yang rendah berimplikasi terhadap rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga daya beli masyarakat juga akan menurun dan berakibat pula pada rendahnya tingkat tabungan masyarakat sehingga modal yang digunakan atau disalurkan untuk kegiatan investasi juga rendah sehingga peluang tumbuhnya usaha-usaha baru menjadi kecil, tingkat penyerapan tenaga kerja juga minim sehingga banyak terjadi pengangguran yang akan menambah beban pemerintah dengan meningkatkan biaya sosial sehingga dapat dikatakan masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang rumit dan tidak berujung pangkal seperti lingkaran setan.

Untuk memutus mata rantai kemiskinan ditempuh dengan jalan peningkatan kualitas sumber daya manusia karena sumber daya manusia merupakan sebuah agen pembangunan yang memiliki peranan penting dalam mengelola sumber daya yang ada untuk mencapai kesejahteraan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Dengan hal tersebut diharapkan produktivitas tenaga kerja akan meningkat dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan perkapita

masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dalam jangka panjang akan memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menjamin tercapainya kualitas hidup masyarakat yang tinggi sehingga dapat diartikan bahwa peran pemerintah terkait dengan membawa pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan (Feriyanto: 2014: 217). Kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pembentukan modal manusia yang memiliki arti bahwa merupakan suatu proses yang ditujukan untuk memperoleh sekaligus meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian, wawasan, pendidikan dan keterampilan yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan ekonomi di suatu negara yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, pengorganisasian program studi, migrasi perseorangan guna beradaptasi terhadap peluang kerja yang ada, dan latihan (Jhingan, 2003: 414). Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tentunya pemerintah melakukan intervensi dengan memformulasikan kebijakan pengeluaran pemerintah yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh aspek angka harapan hidup, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya bersekolah, angka melek huruf, serta kemampuan daya beli masyarakat sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merepresentasikan aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat (Feriyanto, 2014:218). Kualitas sumber daya manusia yang baik dapat menentukan arah pembangunan suatu negara, Hal ini dikarenakan sumber daya manusia merupakan agen dan penentu arah pembangunan. Sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi (Daryanto, 1996:47-49).

Dari data pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi di Jawa Timur tahun 2015-2019 dapat diketahui bahwa alokasi anggaran pemerintah paling banyak terjadi di sektor kesehatan, kemudian disusul sektor ekonomi, dan terakhir sektor pendidikan. Berkaitan dengan teori Keynes yang menyatakan terdapat hubungan positif antara pengeluaran publik pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, untuk melihat hubungan kausalitasnya maka disajikan pula pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Berikut merupakan grafik pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur:



Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Tahun 2015-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional 2019

Berdasarkan grafik pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2015-2019 diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terendah tercatat pada tahun 2015 sebesar 5,44% dan tertinggi tahun 2016 sebesar 5,57. Pada kurun waktu 2015-2019 atau lima tahun terkahir relatif stabil pada angka 5%. Berdasarkan latar belakang diatas yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah di Jawa Timur mengalami fluktuasi namun cenderung terjadi peningkatan di setiap tahunnya, dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur juga terjadi fluktuasi di setiap tahunnya namun cenderung mengalami penurunan, di sisi lain terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur relatif tinggi secara Nasional, namun tingkat kemiskinan juga masih tinggi. Hal ini berarti meskipun laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mempunyai kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut tidak selalu diiringi oleh penurunan kemiskinan secara signifikan. Kedua, jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Faktor penyebab kemiskinan di Jawa Timur antara lain di sebabkan oleh beberapa faktor berikut, antara lain tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah, Indeks pembangunan manusia yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat, laju pertumbuhan penduduk yang cepat, perhatian pemerintah yang kurang, serta distribusi yang tidak merata. Terjadinya fenomena tersebut mengindikasikan bahwa terjadi gap antara teori Keynesian yang menyatakan bahwa semakin tinggi pengeluaran pemerintah berimplikasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tentunya dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada peningkatan pembangunan dan pemerataan ekonomi sehingga dapat mengurangi jumlah

penduduk miskin. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai fenomena yang ada dan melakukan penelitian lebih dalam mengenai “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Angka Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Pemerintah memiliki peranan untuk mensejahterakan masyarakat, peranan pemerintah tersebut diwujudkan dalam bentuk intervensi pemerintah melalui serangkaian program-program tertentu yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan dalam hal ini adalah melalui pengeluaran pemerintah. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi dan memutuskan mata rantai kemiskinan adalah dengan meningkatkan mutu modal manusia. Mutu modal manusia dapat ditingkatkan melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan taraf hidup yang layak. Untuk meningkatkan mutu modal manusia pemerintah menempuh cara yakni dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan, pengeluaran di bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan pengaluaran di bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan taraf hidup masyarakat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut teori Keynesian peningkatan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil pertumbuhan ekonomi dapat dialokasikan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Sehingga untuk mengulas lebih dalam adanya hubungan pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap penurunan angka kemiskinan dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
5. Bagaimana pengaruh IPM terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas terkait dengan pengaruh pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk mengetahui pengaruh IPM terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Melalui Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif sekaligus menjadi tambahan referensi untuk penelitian selajutnya. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi peneliti guna membandingkan teori yang ada dengan bukti empiris, selain itu juga dapat memberikan kontribusi guna mengembangkan metode dan variabel penelitian.

2. Bagi Pemerintah

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk merumuskan formulasi kebijakan yang tepat sasaran untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Timur dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari adanya alokasi pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan mutu modal manusia serta pemeratakan pembangunan ekonomi atas adanya pertumbuhan ekonomi yang tercipta. Selain itu penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan

untuk menentukan arah dan strategi pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesebroto, 2002). Menurut Sukirno (2004: 25), Pengeluaran Pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah. Pengeluaran pemerintah berperan untuk mempertemukan permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak swasta.

Pengeluaran pemerintah adalah salah satu elemen dari permintaan agregat (*agregat demand*). Konsep pengeluaran pemerintah merupakan salah satu acuan dalam penghitungan pendapatan nasional yakni melalui pendekatan pengeluaran yang formulasinya adalah $Y = C + I + G + X - M$. Dalam hal ini Y merupakan pendapatan nasional atau penawaran agregat dalam arti luasnya sedangkan variabel C adalah konsumsi, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah atau *government expenditure* dan X adalah ekspor, serta M merupakan impor (Dumairy, 1996:156-164). Dalam hal ini besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan atau peningkatan pendapatan nasional dapat diketahui dengan membandingkan nilai G terhadap Y atau nilai *government expenditure* terhadap pendapatan nasional sehingga dengan demikian dapat dianalisa pentingnya peranan pemerintah dalam peningkatan perekonomian nasional. Dalam hal ini juga terdapat konsep campur tangan dan fungsi pemerintah dibidang ekonomi. Pemerintah banyak melakukan beberapa pengeluaran guna menunjang dan membiayai kegiatan-kegiatan operasionalnya, pengeluaran ini tidak hanya untuk menjalankan roda pemerintahan saja melainkan untuk membiayai kegiatan perekonomian dalam arti pemerintah memiliki tugas untuk menggerakkan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas atau kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Pemerintah juga turut andil dalam memelopori sekaligus menjalankan kegiatan ekonomi yang notabennya masyarakat umum dan pihak swasta belum tertarik untuk menjalankannya, disisi lain pemerintah juga perlu melakukan intervensi atas kepemilikan dan pengelolaan kegiatan ekonomi apakah dikelola oleh pemerintah atau swasta sehingga hal inilah yang mendasari jika pemerintah juga harus melakukan berbagai pengeluaran. Dalam

perekonomian modern terdapat berbagai peranan pemerintah yang dapat dikelompokkan menjadi 4 peran yakni sebagai berikut (Mangkoesebroto, 2002):

2.1.1.1 Fungsi Alokatif Pemerintah

Fungsi alokatif memiliki arti bahwa pemerintah memiliki peranan yakni mengalokasikan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat tercapai efisiensi produksi. Dalam aktifitas ekonomi yang seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak preferensi terhadap barang dan jasa yang disediakan baik untuk diproduksi maupun dikonsumsi oleh masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut barang-barang itu terbagi menjadi barang pribadi dan barang sosial, terhadap barang pribadi individu dapat memilikinya secara pribadi dan dapat dikonsumsi secara pribadi pula yang dapat diperoleh melalui adanya transaksi jual beli, sedangkan barang sosial baik kepemilikan dan konsumsinya tidak dapat dilakukan secara pribadi dengan kata lain dilakukan secara bersama-sama seperti penggunaan jalan umum, jembatan, pertahanan, keamanan negeri dan lain sebagainya sehingga barang sosial ini tidak dapat disediakan oleh pihak swasta karena tidak dapat dikomersilkan. Adanya barang sosial mengindikasikan terjadinya kegagalan pasar dalam menyediakannya dan berimplikasi pada ketidakmampuan pihak swasta untuk menyediakan dikarenakan tidak bisa diperjual belikan, disisi lain diperlukan pula investasi yang besar untuk memproduksinya. Sehingga diperlukan intervensi pemerintah guna menyediakan barang tersebut untuk menunjang kegiatan ekonomi agar berjalan dengan efektif dan efisien serta dampak adanya pengadaan barang sosial tersebut dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat.

Pemerintah juga berperan dalam mengatasi dampak sampingan (*side effects*) yang terjadi akibat adanya aktifitas ekonomi yang terjadi. Efek atau dampak sampingan tersebut bisa berupa efek negative maupun efek positif yang disebut dengan eksternalitas, dengan adanya eksternalitas tersebut maka pemerintah melakukan intervensi untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur penggunaan sumber daya ekonomi yang ada agar alokasi sumber daya tersebut dapat terjadi secara merata. Dalam melakukan peran alokatif ini pemerintah juga dituntut untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar karena pemerintah juga bertindak sebagai pelopor dan pengendali pembangunan.

2.1.1.2 Fungsi Distributif Pemerintah

Di berbagai negara banyak terdapat kasus ketidakmerataan atau ketimpangan baik ketimpangan dalam hal kepemilikan sumber daya maupun kesempatan ekonomi. Hal ini

terjadi baik diantara lapisan masyarakat, antar wilayah di suatu negara, maupun di sektor-sektor ekonomi yang ada., tidak hanya itu dalam hal pembagian hasil-hasil pembangunan ekonomi juga harus dilakukan secara merata sehingga untuk mewujudkan semua itu diperlukan intervensi pemerintah untuk mengurangi ketidakmerataan atau kesenjangan ekonomi karena hal ini akan menghambat produktivitas dari sebuah aktivitas perekonomian.

Adanya ketimpangan kepemilikan sumber daya dan kesempatan ekonomi akan menciptakan fenomena terkonsentrasinya kekuatan dan kekuasaan ekonomi di suatu pihak baik dalam kategori lapisan masyarakat, wilayah maupun sektor sehingga akan lebih dalam lagi menimbulkan *bargaining position* atau daya tawar antar pelaku ekonomi menjadi tidak seimbang. Fenomena tersebut mengarah pada terjadinya struktur pasar menjadi oligopolistic bahkan monopolistic sehingga efisiensi produksi menjadi kurang terlaksana serta alokasi sumber daya menjadi tidak optimal. Hal ini dapat terjadi karena produktivitas dan harga barang yang terbentuk dilatarbelakangi oleh ekonomi biaya yang tinggi sebagai akibat adanya kewenangan dari pihak yang memiliki kekuasaan dan kesempatan ekonomi yang tinggi, dan harga bukan diperoleh melalui mekanisme pasar (keseimbangan antara permintaan dan penawaran).

Adanya ketidakseimbangan penawaran akan menyebabkan pasar menjadi lemah, dalam kondisi ini permintaan menjadi turun karena konsumen mengalami ketidakmampuan dalam daya beli yang disebabkan harga barang menjadi lebih mahal, sehingga dampak ini akan menyebabkan aktivitas produksi menjadi turun. Dari segi nonekonomi, terjadinya kesenjangan ekonomi menyebabkan adanya kecemburuan sosial dan keresahan sosial yang akan berujung pada kerusuhan sosial sehingga akan mengganggu kestabilan nasional. Sehingga disini diperlukan intervensi pemerintah untuk mengatur pemerataan dan redistribusi sumber daya ekonomi guna mengatasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan melalui jalur penerimaan dan pengeluaran. Dari segi penerimaan pemerintah menciptakan kebijakan pajak dan sumber pendapatan yang lainnya untuk didistribusikan secara merata, disisi lain pemerintah juga melakukan pengeluaran pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

2.1.1.3 Fungsi Stabilisatif Pemerintah

Pemerintah mengambil alih peran untuk menstabilkan gejolak perekonomian yang terjadi di suatu negara. Adakalanya fenomena ekonomi tidak dapat diatasi oleh pihak swasta seperti masalah inflasi, resesi, dan meludaknya komoditas barang impor, tingginya

suku bunga perbankan, perang harga yang disebabkan adanya politik dumping yang dilakukan oleh perusahaan pada suatu industry.

Ketidakmampuan pihak swasta untuk mengatasi masalah perekonomian yang bersifat objektif berada diluar kemampuan mereka sehingga intervensi pemerintah haruslah dilakukan. Namun adakalanya pemerintah memicu terjadinya adanya masalah perekonomian secara subjektif dengan mengeluarkan kebijakan kenaikan upah pekerja, kebijakan kepemilikan pemegang saham di perusahaan sehingga dalam hal ini pemerintah dianggap terlalu dini untuk melakukan intervensi dengan alibi untuk menjaga dan memulihkan stabilitas perekonomian.

2.1.1.4 Fungsi Dinamisatif Pemerintah

Di negara yang sedang berkembang seringkali pihak swasta tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan ekonomi tertentu, sehingga hal ini memicu campur tangan pemerintah untuk memacu dan memulai kegiatan ekonomi tersebut agar terlaksana terlebih dahulu sehingga dalam hal ini dapat dikatakan peran dinamisatif yang dimiliki oleh pemerintah dapat dilakukan dengan merintis terlaksananya kegiatan-kegiatan ekonomi misalnya membuka jalur penerbangan baru pesawat komersial, pemekaran kota dengan jalan serta memindahkan pusat kegiatan pemerintah daerah ke lokasi baru, dapat pula dilakukan dengan cara mempercepat pertumbuhan bisnis tertentu misalnya dengan cara mengalokasikan anggaran yang lebih memadai ke bidang tersebut. Dalam melaksanakan fungsi dinamisatif, pemerintah berhak untuk mengambil alih kegiatan yang pada awalnya dilaksanakan oleh pihak swasta. Adapun teori-teori pengeluaran pemerintah yakni sebagai berikut:

Keseimbangan pendapatan nasional yang dapat diformulasikan dengan $Y = C + I + G + X - M$ adalah sebuah pandangan dari penganut *Keynesian* yang didalamnya tersirat bahwa diperlukan intervensi pemerintah di dalam sebuah perekonomian. Dari formulasi tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan dan penurunan pengeluaran pemerintah akan berimplikasi pada peningkatan dan penurunan pendapatan nasional. Dalam hal ini pemerintah harus lebih bijak lagi untuk menganalisis dampak terhadap kebijakan pengeluaran pemerintah yang dikeluarkannya. Tidak hanya untuk menikmati tujuan akhir akan adanya kebijakan yang dikeluarkan namun pemerintah juga dituntut untuk mengetahui sasaran dari aplikasi kebijakan tersebut.

Adolph Wagner telah melakukan sebuah penelitian empiris terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah

dalam sebuah perekonomian. Hal ini diukur dengan membandingkan pengeluaran pemerintah terhadap produk nasional yang kemudian temuan ini disebut “hukum pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat” (*law of growing public expenditures*) oleh Richard A. Musgrave, sedangkan oleh Wagner disebut hukum aktivitas pemerintah yang selalu meningkat (*law of ever increasing state activity*), hukum tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\frac{GpCt}{YpCt} > \frac{GpCt-1}{YpCt-1} > \frac{GpCt-2}{YpCt-2} > \dots > \frac{GpCt-n}{YpCt-n}$$

Keterangan:

GpC : Pengeluaran pemerintah per kapita

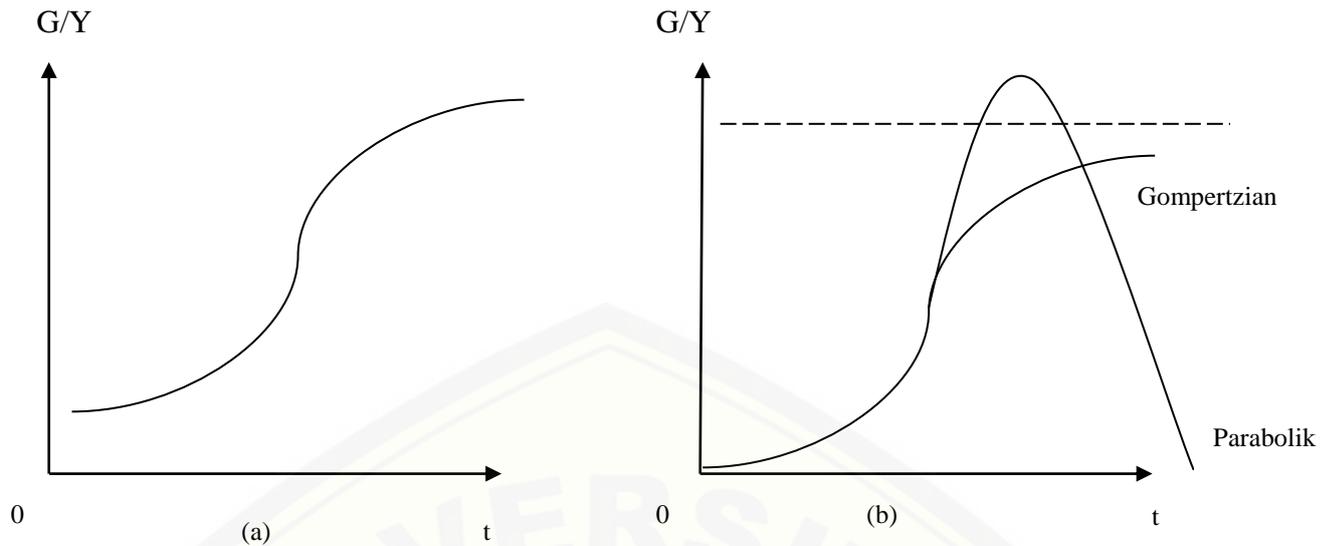
YpC : Produk atau pendapatan nasional perkapita

t : indeks waktu atau perubahan waktu

Wagner mengemukakan bahwa terdapat lima hal yang menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah yang terdiri dari:

- a. Adanya tuntutan untuk meningkatkan perlindungan keamanan dan pertahanan,
- b. Adanya tingkat pendapatan masyarakat yang kian meningkat,
- c. Adanya pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan terjadinya urbanisasi,
- d. Adanya demokrasi yang terus berkembang di kalangan masyarakat dari waktu ke waktu,
- e. Terjadinya ketidakefisienan birokrasi dalam proses pemerintahan yang berlangsung.

Selanjutnya terdapat grafik yang menunjukkan rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional (GpC/YpC atau dengan notasi lain G/Y) yang ditunjukkan oleh kurva model eksponensial. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah dalam jangka panjang kurva yang berbentuk eksponensial tersebut apakah akan mengalami perubahan menjadi pola Gompertzian (terdapat suatu batas maksimum di titik tertentu pada rasio G/Y) atau akan menjadi pola berbentuk parabolic (pada suatu batas tertentu atau titik tertentu rasio G/Y akan mengalami penurunan kembali). Hal ini dapat ditunjukkan pada grafik berikut ini:



Gambar 2.1 Kurva rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional, berdasarkan Hukum Wagner

Sumber: Dumairy (1996:162)

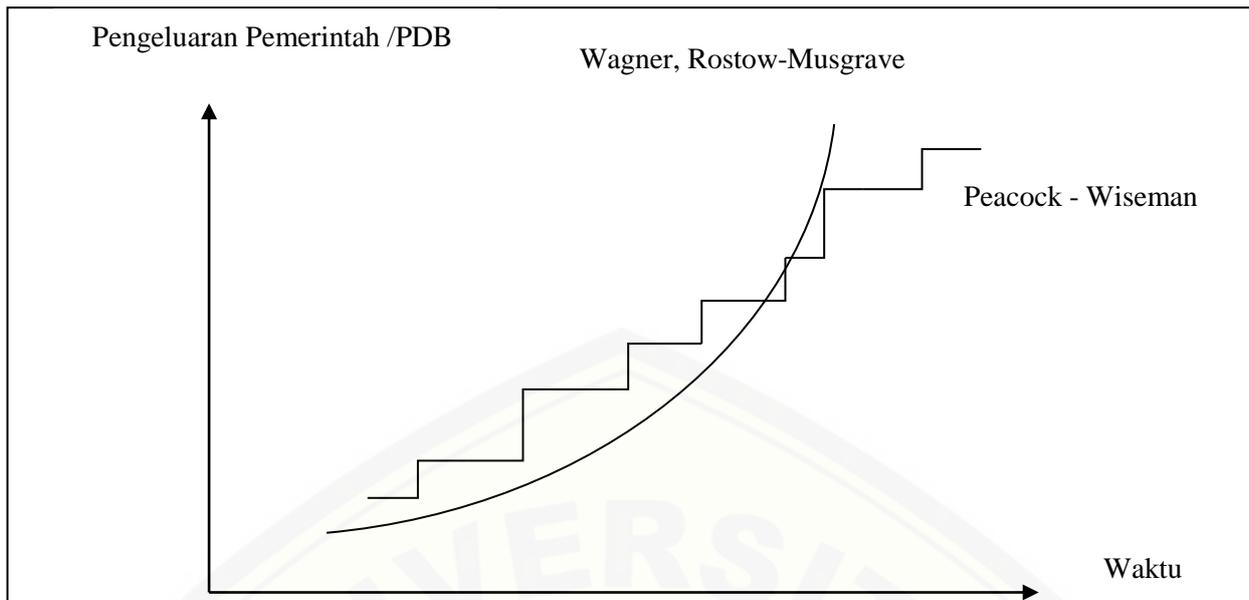
Selain Wagner, terdapat beberapa ahli yang mengemukakan teori pengeluaran pemerintah yakni WW. Rostow dan RA Musgrave. Dalam hal ini ahli tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada awal perkembangan ekonomi terdapat fenomena bahwa rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional adalah tergolong besar, penyebabnya adalah pada tahap awal pembangunan ekonomi maka pemerintah berkewajiban untuk menyediakan berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana guna menunjang aktivitas perekonomian. Sedangkan pada tahap selanjutnya yakni tahap menengah pembangunan ekonomi, maka pemerintah akan melakukan investasi yang digunakan untuk memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas, tentunya hal ini juga berkaitan dengan meningkatnya porsi investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Namun pada tahap ini juga tetap diperlukan intervensi pemerintah karena kegagalan pasar sering terjadi, hal ini disebabkan oleh perkembangan yang terjadi pada perekonomian itu sendiri, salah satunya terjadinya kasus eksternalitas negative yang ditandai oleh terjadinya pencemaran lingkungan sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk menagtasi hal tersebut.

Musgrave mengemukakan bahwa pada suatu proses pembangunan ekonomi, terdapat kecenderungan bahwa rasio total investasi terhadap pendapatan nasional akan semakin besar atau meningkat, namun disisi lain rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan menjadi menurun. Sementara itu, ahli lain bernama Rostow mengemukakan hal lain yakni pada tahap lanjutan dari pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah mengalami

pergeseran yang pada awalnya pemerintah bertugas untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi maka aktivitas pemerintah beralih melakukan pengeluaran untuk menyediakan sarana, prasarana dan layanan sosial dibidang kesehatan dan pendidikan.

Sementara itu, Peacock dan Wiseman mengemukakan bahwa pemerintah dalam hal ini selalu berupaya untuk memperbesar pengeluarannya, tentunya selalu diimbangi dengan penerimaan yang selalu meningkat maka pemerintah menggenjot penerimaan dari sektor pajak, hal ini tentu bertolak belakang karena masyarakat pada umumnya tidak menghendaki tariff pajak yang tinggi. Dalam hal ini masyarakat memiliki batas toleransi dalam hal pemungutan tarif pajak dengan perkataan lain bahwa masyarakat memiliki porsinya sendiri dalam hal memahami seberapa besar pemerintah memungut tariff pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga hal ini merupakan suatu problem bagi pemerintah guna menaikkan tarif pajak.

Peacock dan Wiseman juga menyebutkan bahwa dalam perkembangan dan pembangunan ekonomi menyebabkan pungutan mengalami peningkatan. Dalam kondisi normal, peningkatan pendapatan nasional akan meningkatkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Ketika terdapat gangguan sehingga mengganggu keseimbangan perekonomian seperti terjadinya perang atau dampak dari eksternalitas negative maka dalam hal ini pemerintah akan meningkatkan pengeluarannya guna mengatasi hal tersebut, seingga hal ini memicu konsekuensi lain yakni pemerintah akan lebih gencar untuk menunjang penerimaan dari sektor pajak. Semakin meningkatnya tariff pajak akan menyebabkan dana yang berasal dari sektor swasta untuk investasi dan modal kerja akan semakin berkurang hal ini disebut efek penggantian (*displacement effect*). Dengan kata lain terjadinya gangguan sosial yang terjadi dalam perekonomian menyebabkan aktivitas swasta akan digantikan oleh aktivitas pemerintah., hal ini tidak cukup hanya dibiayai oleh sektor pajak sehingga terdapat kemungkinan jika pemerintah meminjam dana dari luar negeri. Konsekuensi yang terjadi ketika pemerintah meminjam dana dari luar negeri adalah terdapat kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut beserta bunganya sehingga pengeluaran pemerintahpun menjadi membengkak, akibatnya meskipun gangguan tersebut telah usai maka tarif pajak tidak akan turun kembali ke tingkat semula karena diperlukan penyesuaian atau adaptasi lebih lanjut.



Gambar 2.2 Kurva perkembangan pengeluaran pemerintah berdasarkan pendapat Rostow – Musgrave dan Peacocok – Wiseman

Sumber: Dumairy, (1996:164)

Setelah terjadinya efek penggantian, maka lebih lanjut setelah gangguan perkeonomian itu usai maka akan timbul efek lain yakni efek inspeksi (*inspection effect*), efek ini secara lebih lanjut akan menimbulkan efek kesadaran pada masyarakat akan adanya hal yang perlu diintervensi oleh pemerintah setelah gangguan perekonomian yang terjadi sebelumnya. Dalam hal ini masyarakat menjadi tergerak untuk membayar peningkatan tarif pajak yang lebih besar sehingga akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan pemerintah sehingga hal ini menyebabkan perkembangan pengeluaran pemerintah memiliki pola yakni berlereng positif dengan bentuk patah-patah seperti halnya tangga bukan berpola mulus dan berlereng positif seperti yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave (Grafik 2.4).

2.1.2 Teori Human Capital (Mutu Modal Manusia)

Pendapatan yang diterima oleh seseorang akan tergantung pada kemampuan, keterampilan, dan pendidikan yang dimiliki, dalam memenuhi kebutuhan hidup orientasi seseorang adalah berusaha untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik dan tentunya dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, dengan pendapatan yang tinggi maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan konsumsinya yang pada periode sebelumnya tidak dapat terpenuhi, ketika pendapatan seseorang naik maka berimplikasi pada peningkatan tingkat konsumsi, sehingga daya beli juga meningkat. Seseorang akan berusaha untuk meningkatkan pendapatannya dengan meningkatkan

kemampuan, keterampilan, dan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, sehingga terdapat pandangan bahwa tingginya tingkat kemampuan, keterampilan dan pendidikan adalah sebagai aset yang memiliki tingkat pengembalian bagi pemiliknya, sehingga seseorang akan cenderung lebih meningkatkan kemampuan, keterampilan dan pendidikan yang dimilikinya agar memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pula. Dalam hal ini diperlukan investasi di bidang sumber daya manusia untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia (Feriyanto, 2014:59).

Investasi tidak hanya dilakukan dalam suatu bidang usaha, investasi dapat pula dilakukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga disebut investasi sumber daya manusia. Investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengorbankan konsumsi saat investasi berlangsung dalam rangka mendapatkan tingkat konsumsi yang lebih tinggi pada masa yang akan datang. Investasi sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana dan kesempatan mendapatkan penghasilan selama investasi dilakukan, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan juga konsumsi yang lebih tinggi, sehingga disebut *human capital* yang dapat dilakukan di bidang pendidikan dan latihan, migrasi, perbaikan gizi dan kesehatan (Simanjuntak, 1998:69).

Pembentukan modal manusia merupakan sebuah proses untuk memperoleh dan meningkatkan keahlian, pendidikan dan pengalaman yang dimiliki seseorang sehingga berimplikasi pada peningkatan pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam hal ini pembangunan manusia berkaitan dengan investasi sumber daya manusia agar lebih produktif dan kreatif. Pembentukan modal manusia menurut Schultz dapat dikembangkan melalui beberapa cara yakni (i) fasilitas kesehatan yang meliputi semua pengeluaran publik yang meliputi peningkatan angka harapan hidup, kekuatan dan stamina, serta tenaga dan vitalitas rakyat, (ii) latihan yang terkait dengan jabatan dengan kata lain adalah sebagai bentuk magang kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan (iii) pendidikan secara terstruktur dan terorganisasi yakni pendidikan formal tingkat sekolah dasar, menengah dan tinggi (iv) program studi yang diselenggarakan oleh perusahaan seperti ekstension di bidang pertanian (v) migrasi yang dilakukan baik secara pribadi maupun perorangan yang dilakukan untuk adaptasi dengan kesempatan kerja yang selalu dinamis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa investasi modal manusia dalam pengertian luas merupakan pengeluaran yang dilakukan dibidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial, sedangkan dalam arti yang sempit merupakan pengeluaran yang dilakukan di bidang pendidikan dan latihan (Jhingan, 2003:41).

Pertumbuhan ekonomi di suatu negara juga tidak hanya dipengaruhi oleh modal fisik saja, melainkan juga investasi modal manusia dalam hal ini meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan rakyat di suatu negara, bahkan tanpa adanya pengembangan pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan maka akan terjadi penurunan produktivitas modal fisik. Modal manusia perlu ditingkatkan guna mempersiapkan tenaga kerja agar menyesuaikan dari system lama yang statis dan tradisional ke system baru yang lebih dinamis dalam rangka transformasi teknologi dalam proses produksi, dengan kata lain adanya pembaharuan atau adanya proses perubahan dari masyarakat statis atau tradisional memerlukan sumber daya manusia atau modal manusia yang berkualitas pula karena modal fisik akan lebih berarti jika dikombinasikan dengan modal manusia yang mumpuni (Jhingan, 2003:415-416).

Menurut Feriyanto (2014:59-60) seseorang yang melakukan investasi di bidang sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan yang dilakukan pada saat ini yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup di masa yang akan datang. Dalam hal ini terdapat konsep waktu sekarang dan yang akan datang sehingga dalam hal ini terdapat konsep waktu dengan perbandingan pengeluaran dengan pendapatan (*cost benefit concept*) yang didalamnya terdapat konsep uang sehingga untuk lebih dalam guna memahami permasalahan investasi sumber daya manusia maka diperlukan konsep *time value of money* (nilai uang berdasarkan waktu). Untuk membandingkan nilai uang pada periode waktu yang berbeda maka digunakan konsep *Present Value* (PV) guna menyamakan waktu perbandingan, dan rumus untuk mencari *Present Value* (PV) yang notabennya merupakan aliran masuk kas (*Cash Inflow = CI*) dikalikan dengan *Angka Present Value* (APV) adalah sebagai berikut:

$$PV = CI \times 1 / (1+r)^n$$

Keterangan:

PV = Nilai sekarang

CI = Aliran kas masuk

$1 / (1+r)^n$ = Angka Present Value (APV)

R = Tingkat suku bunga

N = Periode waktu saat melakukan analisis

2.1.3 Problem Pembentukan Modal Manusia

Terdapat beberapa problem terkait dengan investasi sumber daya manusia yakni terdapat kesulitan dalam hal penaksiran persediaan total modal manusia yang diperlukan di

negara berkembang. Selain itu problem selanjutnya adalah penentuan pada waktu tepat di tahapan mana modal manusia diperlukan, besarnya laju akumulasi modal manusia yang dibutuhkan, kriteria pendidikan yang diperlukan di pasar kerja, serta pengukuran hasil investasi pendidikan yang dilakukan. Dalam hal ini terjadi kesulitan untuk mengestimasi adanya persediaan total modal manusia yang diperlukan di suatu negara berkembang yang menyangkut masalah dalam tahap mana tenaga manusia diperlukan. Pada negara yang sedang berkembang kebutuhan modal manusia pendidikan yang dimiliki lebih banyak diperhitungkan pada berbagai lapangan pekerjaan, ketika dalam tahap awal pembangunan ekonomi di suatu negara yang proses produksinya kompleks maka diperlukan tenaga manusia yang memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan mesin-mesin daripada sarjana, sehingga dengan perkataan lain kebutuhan tenaga kerja manusia disesuaikan menurut kebutuhan di masing-masing negara.

Problem investasi yang dialami oleh negara-negara terbelakang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin memprioritaskan pada pemberian pendidikan dasar secara cuma-cuma dan mewajibkannya, namun disisi lain hal ini dapat menimbulkan pemborosan dan terjadinya stagnasi yang besar sehingga memicu terjadinya beban yang menyangkut fasilitas fisik dan tenaga pengajar di lembaga pendidikan. Disisi lain pendidikan menengah memiliki prioritas yang rendah meskipun pada dasarnya pendidikan menengahlah yang lebih penting karena memberikan ketrampilan penting yang banyak dibutuhkan untuk melakukan pembangunan ekonomi. Fenomena yang terjadi di negara-negara maju, menurut Profesor Lewis orang-orang dengan pendidikan menengah adalah sebagai perwira dan perwira cadangan yang berada dalam sebuah system ekonomi dan sosial, dalam hal ini sebagian kecil yang melanjutkan di perguruan tinggi namun jumlah tenaga manusia yang mengenyam pendidikan tinggi (tingkat universitas) diperlukan dalam jumlah kecil, yang terjadi pada penduduk dengan jumlah hingga lima juta jiwa pada kenyataannya dapat menguasainya dengan baik tanpa adanya universitas sendiri, dilain sisi pejabat bisnis di kelas menengah dan atas hamir seluruhnya terdiri dari produk sekolah dan menengah, namun pada kasus negara terbelakang potensi untuk menempuh pendidikan hingga mencapai pendidikan tinggi adalah sangat besar, dan banyak universitas baru telah dibuka tanpa adanya konsekuensi untuk memperbaiki standar pendidikan, dalam hal ini tidak terdapat pembatasan pada pendidikan tinggi sehingga memicu terjadinya kegagalan pada tingkat pendidikan menengah dan universitas sangat tinggi sehingga konsekuensi yang terjadi adalah kegagalan missal dan penurunan umum dari standarisasi akademis sehingga berimplikasi pada penurunan efisiensi para sarjana. Hal tersebut merupakan pemicu terjadinya pemborosan sumber daya manusia, dalam hal ini

ketidakadaannya perencanaan tenaga kerja dengan baik maka tidak ada pula penyesuaian permintaan dan penawaran berbagai jenis keterampilan sehingga implikasinya hanya beberapa negara saja yang dapat menyerap lulusan universitas yang kurang terlatih secara lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi umum, seiring berjalannya waktu negara berkembang akan mengalami problem yakni terjadinya ketidakpuasan dan adanya frustrasi yang mengarah pada pengangguran sarjana, selain rendahnya system pendidikan masalah lain yang juga terjadi adalah kurangnya biro tenaga kerja, struktur gaji dan upah yang rendah, enggan menerima pekerjaan di daerah pekerjaan karena menganggap pekerjaan tersebut berstatus rendah, selain itu masalah lain yang terjadi adalah kurangnya pendidikan pertanian, pendidikan orang dewasa dan program pelatihan kerja yang diabaikan (Jhingan, 2003:417-419).

Menurut Harbison investasi di bidang pendidikan akan lebih efektif guna merangsang percepatan pertumbuhan ekonomi apabila sumber daya manusia diberikan stimulus yang melibatkannya pada berbagai jenis kegiatan yang produktif untuk mempercepat proses modernisasi, selain itu diperlukan langkah-langkah yang tepat guna menggeser pemahaman mendidik tenaga manusia ke lembaga pengguna tenaga kerja serta memberikan bekal kepada lembaga agar menyusun program latihan kerja secara modern. Dalam hal ini terdapat masalah pembentukan modal manusia yang tengah dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang yakni laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, meningkatnya pengangguran di sektor perekonomian modern dan pertanian tradisional, kualitas sumber daya manusia tergolong rendah karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki, kurang efektifnya organisasi dan lembaga guna memobilisasi tumbuhnya lapangan usaha baru, serta kurangnya motivasi orang-orang guna melibatkan diri pada kegiatan yang penting dalam upaya penunjang pembangunan nasional (Jhingan, 2003: 419-420).

2.1.4 Kriteria Investasi Modal Manusia

Menurut Jhingan (2003:420-424), Terdapat beberapa permasalahan mengenai efektivitas maupun produktivitas investasi di bidang pembentukan modal manusia spesifiknya pada aspek pendidikan, dari permasalahan tersebut para ahli menyarankan adanya kriteria mengenai investasi modal manusia yakni sebagai berikut:

1. Kriteria Tingkat Pengembalian.

Pendidikan termasuk kedalam suatu investasi yang didalamnya mencakup dua komponen yang terdiri dari komponen untuk konsumsi masa depan dan komponen penghasilan di masa depan. Dalam hal ini dengan melakukan investasi pada bidang keterampilan dan

pengetahuan akan dapat meningkatkan penghasilan di masa depan, disisi lain kepuasan yang diperoleh dalam menempuh pendidikan dapat dikatakan merupakan sebuah konsumsi. Pendidikan yang merupakan sebuah komponen konsumsi tidak termasuk kedalam ukuran pendapatan nasional jika dilihat dari sisi sumber kegunaan di masa depan. Dalam menghitung pengembalian investasi di bidang pendidikan penting untuk memperhatikan komponen penghasilan di masa depan, biasanya metode yang dipakai adalah didasarkan pada perbandingan antara penghasilan hidup rata-rata orang yang memiliki pendidikan tinggi dengan orang-orang yang kurang berpendidikan dalam kategori pekerjaan yang ditekuni adalah sama. Dalam melakukan perhitungan diatas terdapat beberapa kesulitan yakni sebagai berikut:

- a. Pengukuran yang dilakukan hanya sebatas mengukur keuntungan material langsung dan tidak langsung yang dapat diperoleh negara yang berasal dari perbaikan yang dilakukan oleh masyarakat.
 - b. Yang diperoleh masyarakat bukan hanya semata-mata karena pendidikan di tingkat universitas melainkan berasal dari kemampuan alamiah, pengalaman yang dimiliki, status sosial, koneksi keluarga, pelatihan kerja, dan lain sebagainya.
 - c. Kriteria tingkat pengembalian hanyalah mengukur tingkat pengembalian investasi yang dilakukan oleh swasta di bidang pendidikan.
 - d. Pengembalian investasi guna menciptakan keterampilan dan pengetahuan tidak meningkatkan pendapatan yang diterima oleh individu melainkan kapasitas produksi dari total perekonomian.
 - e. Eckaus menyatakan bahwa upah yang diterima oleh pekerja yang berpendidikan pada perhitungan tingkat pengembalian harus mencakup gambaran mengenai kelangkaan relatif dari faktor yang terkait, namun ketika biaya investasi di bidang pendidikan dibiayai oleh pemerintah maka upah pekerja yang notabennya memiliki pendidikan tidak mengindikasikan terjadinya kelangkaan input yang ditentukan dalam pasar yang bersaing. Di lain sisi analisa kriteria tingkat pengembalian tidak memberikan informasi tentang banyak dan macam dari pendidikan tambahan yang diperlukan bagi pelaksanaan pembangunan ekonomi.
2. Kriteria Sumbangan Pendidikan Pada Pendapatan Nasional Bruto.
- Investasi pada bidang pendidikan salah satunya ditentukan oleh sumbangsihnya dalam upaya peningkatan pendapatan nasional bruto maupun pembentukan modal fisik dalam periode waktu tertentu. Dalam kriteria ini, dinilai lebih realistis dan tepat daripada kriteria tingkat pengembalian di bidang pendidikan hal ini dikarenakan pada kriteria ini

mengukur adanya dampak investasi dibidang pendidikan pada suatu perekonomian. Perkiraan ini didasarkan pada biaya alternatif yang dikeluarkan selama menempuh pendidikan (dalam hal ini pendapatan yang hilang dan seharusnya diterima oleh siswa selama menempuh pendidikan baik di sekolah, akademi maupun universitas) dan biaya yang dikeluarkan saat menempuh pendidikan formal setelah memperhitungkan adanya biaya penyusutan. Dalam kriteria ini juga terdapat kelemahan yakni perhitungan pendapatan yang hilang tersebut termasuk rumit yakni metode penghitungannya apakah dihitung dari penghasilan masa kini dari orang-orang yang termasuk kedalam kelompok usia yang sama yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Selain itu adanya pengangguran yang tergolong tinggi jumlahnya yang tidak memiliki penghasilan dalam hal ini tidak dapat mengukur dampak dari adanya investasi pendidikan pada pendapatan nasional secara akurat.

3. Kriteria Faktor Residual.

Dalam hal ini para ahli seperti Solow, Kendrick, Denison, Jorgenson, dan Griliches serta Kuznets dan ahli ekonomi lainnya melakukan penelitian dengan cara mengukur besarnya proporsi peningkatan Produk Nasional Bruto dalam kurun waktu satu periode yang dihubungkan dengan input modal dan buruh, serta besaran yang menyatakan kenaikan Pendapatan Nasional Bruto yang berasal dari faktor lain dalam hal ini termasuk dalam kelompok residual yang meliputi pendidikan, pelatihan, penelitian, skala ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan produktivitas manusia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Denison di Negara Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1927-1957 menyatakan bahwa pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional riil sebesar 23%, sedangkan faktor residual yang lain berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan pendapatan nasional riil sebesar 31%, hal ini tentunya tidak terlepas dari peranan kemajuan ilmu pengetahuan sebesar 20 % dan skala ekonomi yang muncul akibat dari pertumbuhan pasar nasional sebesar 11%. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Solow di Amerika Serikat ada periode 1909-1949 dengan mengkaitkan 90% dari laju pertumbuhan rata-rata output perkapita pada faktor residual dibawah perubahan teknikal.

Kriteria faktor residual juga memiliki kelemahan, terhadap kelemahan ini terdapat beberapa kritik yakni sebagai berikut:

- a. Kriteria faktor residual pengertiannya sangat luas dan mencakup beberapa ragam faktor seperti: skala ekonomi, perubahan teknis, pendidikan, riset dan pelatihan sehingga faktor ini menjadikan kriteria faktor residual menjadi rumit.

- b. Kriteria faktor residual juga meliputi perbaikan aset modal yang dapat dikaitkan dengan perbaikan kualitas keterampilan dan pengetahuan sumber daya manusia.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Jorgenson dan Griliches menyatakan bahwa residual yang dihubungkan dengan kemajuan ilmu pengetahuan memiliki pengaruh kecil, hal ini mengindikasikan kontribusi dari adanya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagian besar di dominasi oleh adanya penghasilan yang diperoleh dari investasi swasta (*private returns to investment*).
- d. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Jorgenson dan Griliches pada perekonomian Amerika Serikat tahun 1949-1955 menjelaskan bahwa residual tidak perlu dijelaskan setelah dilakukan koreksi atas kesalahan yang terjadi secara menyeluruh pada modal, buruh, harga dan lain sebagainya.
- e. Dalam kriteria residual yang didasarkan pada fungsi produksi yang mengarah pada skala hasil (*returns to scale*) yang bersifat konstan, namun dalam kenyataannya pada perekonomian di negara maju tergantung pada skala hasil yang sifatnya meningkat maka pertumbuhan output yang dihasilkan menjadi lebih banyak dikarenakan kenaikan yang terjadi pada input fisik namun terjadi kekurangan pada naiknya faktor residual. Selain itu, sumbangan modal terhadap pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan dalam kriteria ini, dalam hal ini sumber yang digunakan untuk meningkatkan kemajuan pengetahuan dianggap sebagai suatu investasi, selain itu dalam hal persediaan modal dalam hal ini mencakup sebuah investasi, sehingga dapat dikatakan bahwa laju pertumbuhan akan berkaitan dengan peningkatan persediaan modal, dan faktor pengetahuan, keterampilan, pelatihan adalah termasuk dalam kategori residual sehingga juga dapat dikatakan mempengaruhi pertumbuhan walaupun dalam porsi yang kecil. Dalam uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesulitan yang terkait dengan masalah investasi pada modal manusia yang berhubungan dengan keterbelakangan pertumbuhan yang terjadi di negara berkembang dikarenakan oleh kekurangan modal fisik, selain itu juga disebabkan oleh kurangnya keterampilan dan pengetahuan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya keterbatasan kapasitas perekonomian dalam menyerap persediaan modal fisik yang tersedia sehingga pembentukan modal manusia dianggap lebih penting dibandingkan dengan pembentukan modal material.

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (1998:10) pertumbuhan ekonomi memiliki makna terjadinya perkembangan dan peningkatan kegiatan perekonomian yang ditandai dengan bertambahnya produksi akan barang dan jasa serta diiringi dengan peningkatan taraf hidup dan kemakmuran masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah sebagai tolok ukur untuk mengetahui kinerja dan perkembangan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti perkembangan sebuah perekonomian secara fisik yang terjadi di suatu negara yang outputnya meliputi penambahan jumlah dan produksi barang industry, terjadi perkembangan infrastruktur, penambahan fasilitas pendidikan, penambahan proses produksi dan kegiatan ekonomi yang sudah ada sebelumnya, dan berbagai perkembangan lainnya. Dalam hal ini untuk memberikan gambaran tentang perkembangan aspek tersebut terdapat kendala yakni tidak bisa ditemukan nilai pasti untuk mengukur perkembangan ekonomi tersebut sehingga dalam pengukuran konsep pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dapat dicapai oleh suatu negara (Sukirno, 1998:415).

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, hal ini dikarenakan diantara keduanya terdapat hubungan saling ketergantungan, pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi menjelaskan perkembangan kegiatan perekonomian yang ada di suatu negara, namun pembangunan ekonomi tidak hanya terkait dengan perkembangan pendapatan nasional riil tetapi juga terciptanya modernisasi kegiatan perekonomian, jika pertumbuhan ekonomi hanya menjelaskan tingkat perkembangan perekonomian di suatu negara (Sukirno, 1998:415).

Menurut Sukirno (1998:56-58), perkembangan ekonomi dan prestasi ekonomi suatu negara dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi dengan mengamati pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan menghitung pertumbuhan ekonomi maka suatu negara dapat merencanakan kebijakan untuk mengendalikan perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, selain itu dapat diketahui pula capaian ekonomi di suatu negara dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlu dilakukan perhitungan atas pendapatan nasional riil yakni meliputi Produk Nasional Bruto Riil atau Produk Domestik Bruto Riil, dalam penghitungan pendapatan nasional dilakukan perhitungan atas pendapatan nasional dan komponen-komponen yang melekat menurut harga konstan yakni harga barang dan jasa yang

berlaku di tahun dasar yang telah ditetapkan. Berikut formulasi untuk menghitung pertumbuhan ekonomi disuatu negara:

$$G = \frac{PN-riil_1 - PN-riil_0}{PN-riil_0} \times 100$$

Keterangan:

G = Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen

PN-riil₁ = Pendapatan nasional tahun sekarang

PN-riil₀ = Pendapatan nasional tahun sebelumnya

Adapun opsi ketika suatu negara tidak melakukan penghitungan pendapatan nasional berdasarkan harga konstan maka yang dilakukan untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah dengan dua tahap yakni :

1. Perhitungan pendapatan nasional riil dengan terlebih dahulu mendeflasikan pendapatan nasional pada harga yang berlaku saat ini.
2. Menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan nasional riil dapat dihitung dengan cara mendeflasikan pendapatan nasional pada harga yang berlaku saat ini dengan menggunakan formula berikut:

$$PN_{riil}_1 = \frac{100}{HI_i} \times PN \text{ masa kini }_1$$

Keterangan:

PN_{riil}₁ = Pendapatan nasional riil pada tahun I,

HI_i = GNP deflator

PN masa kini₁ = Pendapatan nasional berdasarkan harga yang berlaku saat ini pada tahun i

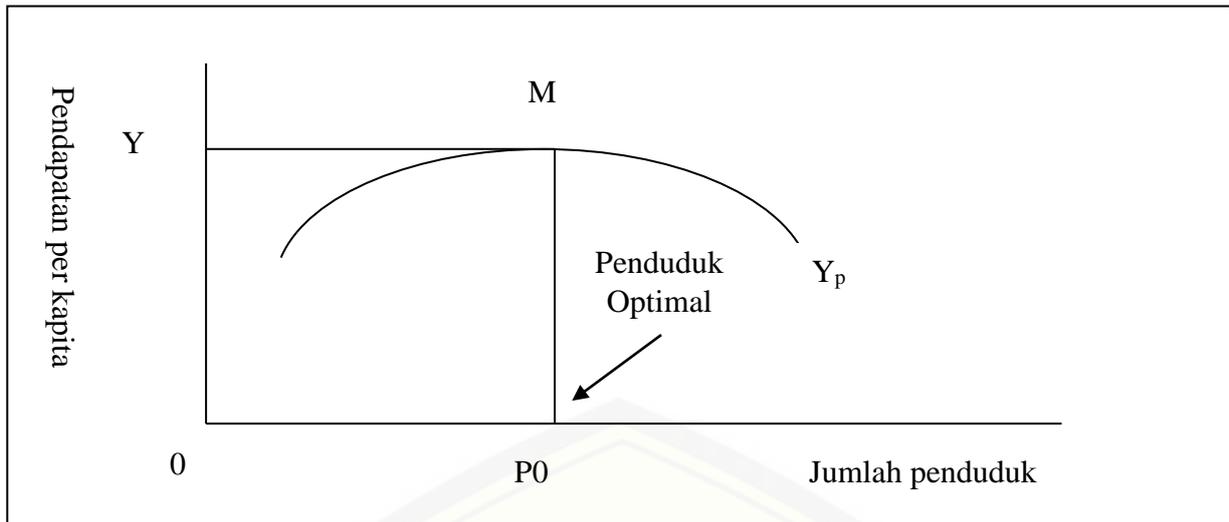
Peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah hal utama yang menjadi tujuan negara-negara di belahan dunia termasuk di negara yang sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat mengentaskan masalah ekonomi termasuk kemiskinan dan ketimpangan. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan perekonomian menjadi lebih maju yang diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan terciptanya pembangunan ekonomi serta pemerataan ekonomi. Menurut Sukirno (2008:433) terdapat beberapa teori yang menyatakan pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi klasik dipelopori oleh Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill. Dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengalami

peningkatan secara terus-menerus melainkan terjadi secara fluktuatif sesuai dengan tahapnya, selain itu dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik juga berlaku hukum “*The Law Of Diminishing Return*” yang artinya berlaku hukum tambahan yang semakin menurun dan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara (Sukirno, 2008:433).

Menurut ahli teori pertumbuhan ekonomi klasik terdapat beberapa hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu total penduduk, banyaknya stok barang-barang modal, luas tanah dan jumlah kekayaan alam, dan kecanggihan teknologi yang digunakan. Dengan kata lain menurut ahli ekonomi klasik terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun teori pertumbuhan ekonomi menurut klasik lebih difokuskan pada peningkatan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan bahwa hukum hasil lebih yang semakin menurun akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi secara terus menerus. Dalam hal ini sistematikanya adalah ketika jumlah penduduk sedikit, dan memiliki kekayaan alam yang banyak, maka dengan adanya investasi yang dilakukan maka terjadi tingkat pengembalian modal yang tinggi sehingga pengusaha lebih banyak mendapatkan keuntungan, sehingga implikasi yang terjadi yakni banyak bermunculan investasi baru sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercipta. Namun ketika penduduk mengalami pertumbuhan maka kegiatan ekonomi akan menurun hal ini dikarenakan produktivitas marginal penduduk bernilai negative, sehingga kesejahteraan masyarakat menurun dan perekonomian mencapai titik perkembangan namun nilainya sangat rendah sehingga perekonomian dikatakan mencapai keadaan tidak berkembang (*Stationary State*), pada tahap ini pendapatan pekerja sebatas hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup (*subsistence*). Berlatar belakang teori pertumbuhan ekonomi klasik maka tercipta teori pertumbuhan penduduk optimal yang menjelaskan bahwa terdapat kaitan antara pendapatan perkapita dan jumlah penduduk, dalam hal ini ketika jumlah penduduk sedikit maka produksi marginalnya lebih tinggi daripada pendapatan perkapita sehingga peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan pendapatan perkapita. Namun ketika jumlah penduduk mengalami peningkatan maka produksi marginal akan mengalami penurunan sehingga pertumbuhan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita akan semakin lambat, dan jumlah penduduk yang semakin bertambah akan menyebabkan produksi marginal pada tingkat jumlah penduduk tertentu akan sama dengan pendapatan perkapita sehingga pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal sehingga dinamakan penduduk optimal. Teori penduduk optimum dijelaskan pada gambar 2.5 berikut ini:



Gambar 2.3 Penduduk Optimum

Sumber: Sukirno (1998:431)

Berdasarkan gambar diatas dijelaskan bahwa penduduk optimal ditunjukkan pada P_0 dan pendapatan per kapita paling maksimal adalah Y_0 .

2. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik berkembang pada tahun 1950, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dipelopori oleh Robert Solow dan Trevor Swan. Dalam teori pertumbuhan neoklasik dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara tidak hanya disebabkan oleh adanya akumulasi modal saja tetapi juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi yang digunakan. Selain itu untuk menghasilkan suatu output berupa barang dan jasa tertentu maka diperlukan modal dan tenaga kerja, ketika dalam memproduksi barang dan jasa lebih banyak menggunakan modal maka tenaga kerja yang digunakan hanyalah sedikit, ketika dalam memproduksi barang dan jasa lebih banyak menggunakan tenaga kerja maka modal yang digunakan akan sedikit. Dengan kata lain terjadi fkesibilitas dalam mengkombinasikan tenaga kerja dan modal dalam rangka menghasilkan tingkat output tertentu (Arsyad, 1992:55-56).

Dalam teori pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik memasukkan adanya unsur teknologi, dalam hal ini teknologi sangat berperan pada proses produksi yakni dapat meningkatkan produktivitas guna menghasilkan output tertentu, dengan meningkatnya produktivitas maka barang dan jasa yang dihasilkan dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan produk di dalam negeri dan selebihnya dapat digunakan untuk komoditas ekspor sehingga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian dan implikais yang terjadi adalah perekonomian di suatu negara akan lebih maju. Namun di sisi lain penggunaan teknologi canggih dalam proses produksi jika diterapkan di negara yang memiliki jumlah penduduk yang tinggi akan mdnyebabkan problem tersendiri karena akan menciptakan pengangguran dikarenakan

banyak fungsi tenaga kerja manusia yang akan digantikan oleh mesin-mesin canggih, sedangkan penggunaan teknologi canggih di negara yang jumlah penduduknya sedikit akan lebih efektif karena peranan tenaga kerja manusia akan digantikan oleh mesin-mesin yang dapat meningkatkan produktivitas dalam menghasilkan suatu tingkat output tertentu, sehingga diperlukan telaah kritis guna dijadikan solusi terhadap kemungkinan negatif yang terjadi akibat penggunaan mesin-mesin canggih dalam proses produksi.

Menurut Sukirno (1998:436-437) menyatakan bahwa teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang sisi penawaran, teori yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi, dirumuskan formula sebagai berikut:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Keterangan:

- ΔY = Tingkat pertumbuhan ekonomi
- ΔK = Tingkat pertambahan barang modal
- ΔL = Tingkat pertambahan tenaga kerja
- ΔT = Tingkat pertambahan teknologi

Selanjutnya berdasarkan formulasi tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dibuat sebelumnya, Solow membuktikan secara matematik dan menunjukkan hasil sebagai berikut:

$$g = m \cdot \Delta K + b \cdot \Delta L + \Delta T$$

Keterangan:

- g = Tingkat/persentasi pertumbuhan ekonomi
- m = Produktivitas modal marginal
- b = Produktivitas marginal tenaga kerja

Pernyataan dari persamaan diatas menyatakan bahwasanya tingkat pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan modal dan produktivitas modal marginal, pertambahan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja marginal, serta kecanggihan teknologi yang digunakan dalam proses produksi.

3. Teori Schumpeter

Menurut Sukirno (1998:432), teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Schumpeter menyatakan bahwa pengusaha memiliki peranan pening dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Pengusaha akan secara terus-menerus menciptakan inovasi dalam kemajuan perekonomian. Inovasi yang dilakukan oleh pengusaha berupa memperkenalkan produk-produk baru, meningkatkan efisiensi dalam produksi suatu barang, mengadakan ekspansi pemasaran produk ke pasar-pasar yang baru, menganeakargamkan

sumber bahan mentah dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi. Menurut Schumpeter dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakannya menjelaskan bahwa pada saat itu perekonomian dalam kondisi stagnan namun kondisi tersebut tidak berlangsung lama, pada saat itu pengusaha menyadari untuk melaksanakan inovasi, inovasi dilakukan dengan motivasi untuk memperoleh keuntungan sehingga langkah yang dilakukan selanjutnya adalah dengan meminjam modal dan melakukan penanaman atas modal tersebut. Dari adanya penanaman modal tersebut investasi baru akan tumbuh dan dengan hal tersebut dapat menyokong perkembangan perekonomian, sehingga pendapatan masyarakat akan bertambah yang diikuti dengan bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat. Peningkatan tersebut akan memicu tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru. Terciptanya lapangan usaha baru akan memicu peningkatan produktivitas dan penanaman modal baru. Menurut Schumpeter semakin maju perekonomian suatu negara maka terdapat keterbatasan kemungkinan untuk melakukan inovasi, dan dampak yang terjadi adalah semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan berada dalam tahap tidak berkembang atau *stationary state*. Pada teori pertumbuhan Schumpeter terjadinya perekonomian yang tidak berkembang terjadi pada tingkat pembangunan yang tinggi.

4. Teori Harrod- Domar

Menurut Sukirno (1998:433-436), teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harrod-Domar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi merupakan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh/ *steady growth* yang berlaku untuk jangka panjang, asumsi yang mendasari teori ini terdiri dari barang modal mencapai kapasitas penuh, tabungan proporsional dengan pendapatan nasional, rasio modal untuk produksi (*capital-output ratio*) adalah tetap, dan perekonomian terdiri dari dua sektor. Dalam teori Harrod Domar menyatakan bahwa jika pada suatu tahun tertentu barang modal telah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat pada suatu tahun tertentu yang dibentuk dari $EA = C+I$ dimana pengeluaran agregat terdiri dari konsumsi dan investasi akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi di tahun berikutnya, dengan kata lain investasi yang dilakukan pada tahun dasar akan menambah kapasitas barang modal pada tahun selanjutnya. Terdapat beberapa syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh dengan kata lain terdapat beberapa syarat agar barang-barang modal dapat mencapai kapasitas penuh. Dalam hal ini teori Harrod-Domar menjelaskan mengenai rasio modal produksi tetap, teori ini menjelaskan penambahan kapasitas barang modal tergantung pada dua faktor yang meliputi rasio modal-produksi itu

sendiri (COR), dan investasi yang dilakukan pada tahun dasar (I), sehingga untuk tambahan kapasitas barang modal dinyatakan dengan formula berikut ini:

$$\Delta C = \frac{I}{COR}$$

Teori Harrod-Domar menyatakan bahwa *full employment* pada tahun selanjutnya akan terwujud jika pengeluaran agregat bertambah besar, formulasinya adalah sebagai berikut:

$$\Delta c = \Delta Y$$

Sedangkan disisi lain teori Keynes menjelaskan bahwa ketika ada pertambahan pengeluaran agregat akan menyebabkan pendapatan nasional akan bertambah, tambahan besarnya pendapatan nasional tergantung pada besaran multiplier, selain itu tambahan adanya pendapatan tersebut diformulasikan sebagai berikut:

$$\Delta Y = \frac{1}{MPS} \cdot \Delta I$$

Dari persamaan diatas maka telah diperoleh tiga persamaan yakni:

- i. $\Delta C = \frac{I}{COR}$
- ii. $\Delta Y = \frac{1}{MPS} \cdot \Delta I$
- iii. $\Delta c = \Delta Y$

Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat kenaikan akan adanya investasi ($\Delta I/I$) adalah sama dengan MPS/COR , dengan kata lain dalam teori Harrod Domar pertumbuhan ekonomi yang teguh dapat mencapai kapasitas penuh dalam jangka panjang. Dengan menggunakan analisis Harrod-Domar dapat diketahui tingkat pertumbuhan ekonomi yang hendak dicapai oleh suatu negara dengan asumsi terus menerus mencapai kapasitas penuh dalam penggunaan barang-barang modalnya, asumsi yang dipakai bahwa tabungan merupakan proporsional dengan pendapatan nasional yang dapat disusun menjadi persamaan berikut ini:

$$S = MPS \times Y$$

Pada kondisi perekonomian dua sektor keseimbangan tercapai jika $S = I$, sehingga menjadi:

$$I = MPS \times Y$$

Atau

$$Y = \frac{1}{MPS}$$

Analisis sebelumnya menyatakan jika:

$$\Delta Y = \frac{1}{MPS} \cdot \Delta I$$

Sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan cara menyelesaikan persamaan berikut ini:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{I}{MPS} \Delta I$$

$$\frac{I}{MPS} I$$

Atau

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta I}{I}$$

Berdasarkan persamaan diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi menurut teori Harrod- Domar adalah sama dengan tambahan investasi.

2.1.6 Teori Kemiskinan

Kemiskinan adalah salah satu masalah ekonomi yang serius dan diperlukan penanganan yang tepat sasaran, hal ini dikarenakan kemiskinan berkaitan dengan berbagai aspek baik dari aspek ekonomi maupun aspek non ekonomi sehingga kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensional. Perlu dirumuskan strategi penanganan kemiskinan yang tepat sasaran agar masalah kemiskinan dapat diatasi.

Kemiskinan memiliki banyak pengertian, seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan dapat digolongkan kedalam kategori miskin sehingga kemiskinan merupakan suatu kondisi yang terjadi dikarenakan seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga jauh dari kata kesejahteraan.

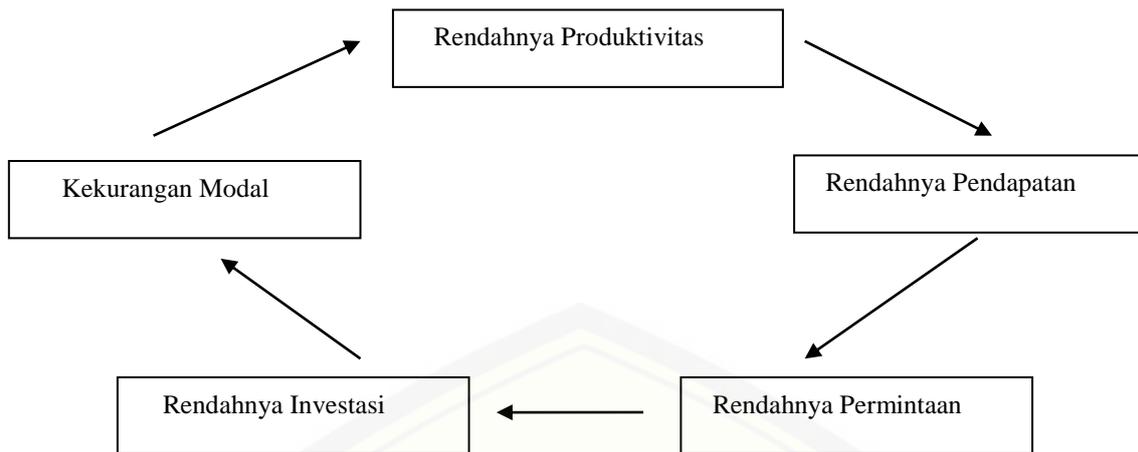
Todaro (2003: 120-121) menyatakan kemiskinan menggambarkan suatu keadaan dengan kondisi tidak terpenuhinya tingkatan minimum dari pendapatan yang subsisten untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar yang berupa kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal guna menjamin kelangsungan hidup atau dengan kata lain kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana penduduk hidup dibawah garis kemiskinan . Dapat dikatakan pula penduduk miskin merupakan mereka yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan yang penyebarannya tersebar luas dengan mata pencaharian bercocok tanam (Todaro, 2003:221).

Menurut Todaro (2003:2 30), kemiskinan absolut merupakan suatu keadaan yang dialami oleh penduduk dengan ketidakmampuannya untuk mendapatkan sumber daya guna memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya, dalam hal ini mereka hidup dengan kondisi dibawah tingkat pendapatan riil minimum atau dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan absolut dapat diukur dengan menggunakan indeks per kepala (*headcount index*)

guna mengetahui banyaknya jumlah orang yang memiliki penghasilan di bawah garis kemiskinan absolut.

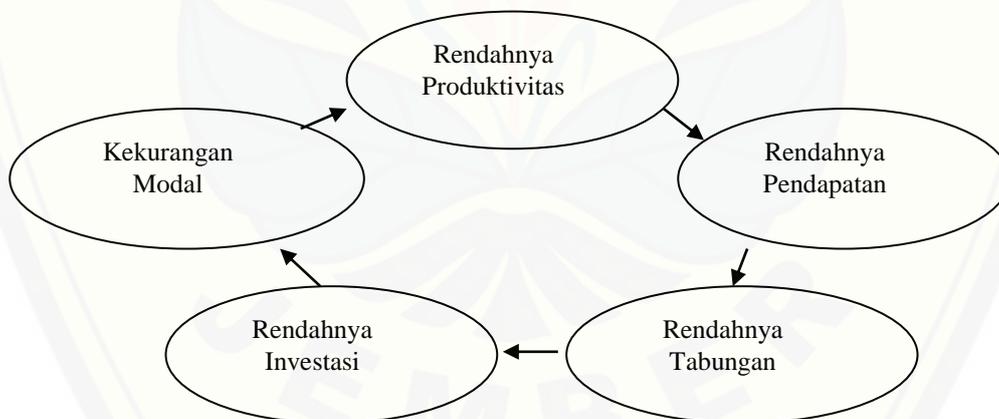
Menurut Badan Pusat Statistik (2010) yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan untuk setiap bulannya. Garis kemiskinan adalah total dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Sedangkan garis kemiskinan makanan merupakan total nilai pengeluaran 52 komoditi makanan dasar yang dikonsumsi oleh penduduk (setara dengan 2100 kilo kalori) perkapita perhari, sedangkan yang disebut dengan garis kemiskinan non makanan merupakan total dari kebutuhan minimum komoditi selain makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Untuk komoditi kebutuhan dasar non makanan terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami di banyak negara baik negara maju maupun negara berkembang, namun masalah kemiskinan lebih banyak dijumpai di negara berkembang, bahkan masalah kemiskinan lebih identik terjadi di negara berkembang. Kemiskinan dapat dikatakan sebagai sebuah penyakit yang terjadi di negara berkembang yang dapat menjerumuskannya kedalam lingkaran kesengsaraan atau biasa disebut lingkaran setan kemiskinan (Jhingan, 2003:17). Teori lingkaran setan kemiskinan di jelaskan oleh Ragnar Nurkse, dalam hal ini lingkaran setan memiliki arti sebagai sebuah permasalahan yang saling bereaksi dan saling mempengaruhi yang menyebabkan suatu negara miskin tetap dalam kondisi miskin sehingga dapat dikatakan suatu negara miskin karena ia miskin. Lingkaran setan kemiskinan disebabkan karena di negara terbelakang memiliki total produktivitas yang sangat rendah yang diakibatkan karena kekurangan modal, ketidaksempurnaan pasar, dan perekonomian yang terbelakang. Jika dilihat dari aspek permintaan dapat dijelaskan bahwa tingkat pendapatan riil yang rendah menyebabkan rendahnya investasi sehingga menyebabkan kekurangan modal dan rendahnya produktivitas. Hal tersebut dapat dijelaskan pada gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4 Lingkaran Setan Kemiskinan Sisi Permintaan
Sumber: Jhingan (2003: 33-34)

Mengacu pada teori lingkaran setan kemiskinan sebagaimana Gambar 2.1, jika dilihat dari sudut pandang penawaran kemiskinan juga disebabkan karena rendahnya produktivitas, produktivitas yang rendah menyebabkan terjadinya rendahnya pendapatan perkapita masyarakat sehingga akan berimbas pada tingkat tabungan juga rendah, rendahnya tingkat tabungan akan mengakibatkan rendahnya investasi sehingga pembentukan modal juga rendah, dan kembali menyebabkan rendahnya produktivitas. Lingkaran setan kemiskinan jika dilihat dari sudut pandang penawaran dapat dijelaskan pada gambar 2.2 berikut ini:



Gambar 2.5 Lingkaran Setan Kemiskinan Sisi Penawaran
Sumber: Jhingan (2003: 33-34)

Lingkaran setan kemiskinan juga dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam. Manusia merupakan agen pembangunan, dikatakan sebagai agen pembangunan karena sumber daya manusia memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan sumber-sumber daya alam yang dimiliki untuk menambah nilai guna sehingga lebih memiliki nilai tambah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam hal ini pengembangan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara dipengaruhi

oleh kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Disisi lain kurangnya sumber daya alam juga menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain suatu negara yang memiliki masalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi dikarenakan sebenarnya negara tersebut miskin dan tidak memiliki sumber daya untuk meningkatkan pembangunan (Jhingan, 2003:34).

Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor sehingga kemiskinan dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Menurut Suryawati (2005) adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolute yakni kemiskinan disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Dalam hal ini pendapatan perkapita yang diterima masyarakat miskin berada di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat yang memiliki pendapatan perkapita berada di bawah garis kemiskinan dikatakan miskin.
2. Kemiskinan relatif yakni ketika pendapatan perkapita seseorang lebih rendah dibandingkan pendapatan orang-orang yang berada di sekitarnya walaupun orang tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga dikatakan miskin karena terjadi ketimpangan pendapatan antar masyarakat hal ini salah satunya dipicu terjadinya ketidakmerataan ekonomi.
3. Kemiskinan cultural yakni terkait dengan segi budaya, dalam hal ini seseorang dikatakan miskin jika budaya yang dianut masyarakat tidak dapat berkembang sesuai dengan keadaan dan tuntutan zaman, dalam hal ini terdapat budaya yang diterapkan oleh masyarakat dapat menyebabkan kemiskinan misalnya budaya konsumtif, kurang produktif, dan tidak mau merubah nasib sehingga dalam hal ini dapat memicu terjadinya kemiskinan.
4. Kemiskinan structural yakni seseorang dikatakan miskin ketika tidak bisa menyesuaikan diri dengan adanya perubahan struktur ekonomi yang terjadi dalam suatu negara. Dalam hal ini seseorang belum mampu menghadapi adanya transformasi atau perubahan yang terjadi di bidang ekonomi sehingga yang terjadi adalah mereka akan tertinggal dan menjadi miskin. Kemiskinan structural juga berkaitan dengan aspek sosial, budaya dan politik sehingga masyarakat miskin akan terisolasi dan tidak dapat menikmati adanya perkembangan yang terjadi karena kurangnya informasi sehingga memicu terjadinya kemiskinan.

Terdapat beberapa variable indicator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pedoman yang menentukan kategori miskin. Dalam hal ini masyarakat dikatakan miskin jika dari 14 variabel indicator tersebut hanya terpenuhi kurang dari 9 yakni sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan yang ditempati kurang dari 8 m² per orang.
2. Lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu dengan kualitas yang kurang baik dan harganya murah.
3. Dinding tempat tinggal terbuat dari bamboo/rumbia/kayu yang kualitasnya rendah, dan tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas untuk buang air besar secara pribadi, dengan kata lain fasilitas buang air besar dilakukan secara bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Tidak menggunakan fasilitas listrik sebagai sumber penerangan rumah.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Dalam seminggu hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam sebanyak sekali.
9. Dalam jangka waktu satu tahun hanya mampu membeli pakaian sebanyak satu stel.
10. Porsi makan hanya satu atau dua kali dalam sehari.
11. Kurangnya akses terhadap fasilitas kesehatan, dalam hal ini tidak mampu membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Kepala rumah tangga memiliki sumber penghasilan dengan matapecaharian sebagai petani, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya yang memiliki luas lahan 500 m², adalah dibawah Rp. 600.000,- setiap bulannya.
13. Kepala keluarga memiliki pendidikan tertinggi yakni tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak dimilikinya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nominal minimal Rp.500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Disisi lain, selain kriteria diatas Badan Pusat Statistik (BPS) juga memberikan kategori penduduk miskin berdasarkan kriteria yang didasarkan pada kemampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dalam hal ini seseorang termasuk ketalam kategori miskin jika dari aspek ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun makanan yang diukur dari segi pengeluaran.

Sehingga penduduk miskin yakni penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya berada dibawah garis kemiskinan (GK). Garis kemiskinan (GK) adalah total penjumlahan dari garis kemiskinan manakan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Pengertian Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan pengeluaran minimum dari kebutuhan makanan yang setara dengan 2100 kilokalori perkapita perhari, dan paket komoditi kebutuhan dasarmakanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umboan, daging, ikan, telur, susu, sayur-mayur, buah-buahan, kacang-kacangan, minyak dan lemak. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum dari terpenuhinya kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, disamping itu paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Dalam hal ini formulasi untuk menghitung Garis Kemiskinan (GK) adalah sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Keterangan:

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan

Garis kemiskinan manakan merupakan banyaknya nilai yang harus dikeluarkan untuk memperoleh 52 komoditi dasar makanan yang dikonsumsi oleh penduduk, hal ini setara dengan 2100 kilokalori perkapita setiap harinya, dasar penyetaraan ini adalah pengeluaran kebutuhan minimum makanan dengan menghitung harga rata-rata dari kalori 52 komoditi bahan pangan. Formulasinya sebagai berikut:

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Keterangan:

GKM_j = Garis kemiskinan makanan yang ada di daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k yang ada di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata dari kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j

V_{jk} = Nilai pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

J = Wilayah/Daerah baik yang ada di perkotaan atau pedesaan.

Langkah selanjutnya GKM_j perlu dilakukan penyetaraan yang ditempuh dengan cara mengalikan 2100 dengan harga implisit dari rata-rata kalori menurut masing-masing daerah j

dengan memperhatikan penduduk yang terdapat di daerah yang ditunjuk, sehingga diperoleh rumus sebagai berikut:

$$HK_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

Keterangan:

K_{jk} = Banyaknya kalori dari komoditi tertentu (k) di daerah tertentu (j).

H_{kj} = Harga rata-rata dari kalori yang ada di daerah j.

Dari formulasi diatas dapat pula diturunkan formulasi untuk mengetahui kebutuhan minimum makanan di suatu daerah guna menghasilkan energy untuk melakukan aktifitas, formulasinya adalah sebagai berikut:

$$F_j = \overline{HK_j} \times 2100$$

Keterangan:

F_j = Kebutuhan minimum akan bahan makanan yang ada di daerah j, yang dapat menghasilkan energi yang setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah penjumlahan yang dilakukan pada kebutuhan minimum dari komoditas non makanan yang berupa perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum untuk setiap komoditas non makanan tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rasio pengeluaran komoditas untuk setiap total pengeluaran komoditas tersebut, dan nilai kebutuhan non makanan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i x V_i$$

Keterangan:

NF_p = Garis kemiskinan non makanan (GKNM) yang ada di daerah p.

V_i = Nilai pengeluaran untuk setiap komoditi atau sub kelompok non makanan daerah yang ada di daerah p.

R_i = Rasio pengeluaran setiap komoditi / sub kelompok non makanan di setiap daerah.

I = Komoditi non makanan terpilih yang ada di daerah p.

P = Wilayah atau Daerah (baik di daerah perkotaan atau pedesaan).

Kemiskinan tentunya memiliki karakteristik tertentu sehingga dapat diklasifikasikan mengenai seseorang atau masyarakat termasuk dalam kategori miskin. Menurut Emil Salim

1976 (dalam Supriatna, 2000;124) terdapat lima karakteristik kemiskinan yaitu sebagai berikut:

1. Penduduk miskin pada umumnya tidak memiliki faktor produksi.
2. Penduduk miskin tidak memiliki kemungkinan dalam kepemilikan faktor produksi secara pribadi.
3. Penduduk miskin memiliki tingkat pendidikan yang rendah
4. Kurang dapat menikmati fasilitas baik fasilitas kesehatan, pendidikan ataupun yang lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa.
5. Pada umumnya penduduk miskin memiliki pendidikan yang rendah, sehingga skill dan keterampilan mereka juga rendah, hal ini memungkinkan terjadinya kegagalan dalam menjalankan usaha.

Kajian mengenai kemiskinan perlu di lihat dari berbagai aspek , tidak cukup hanya melihat dari segi ekonomi saja melainkan juga dari segi non ekonomi. Profil kemiskinan harus diperhatikan secara matang, sehingga akan diperoleh profil penduduk miskin yang sesuai kenyataan, dengan hal tersebut kebijakan yang dirumuskan untuk mengentaskan kemiskinan akan sesuai dan tepat sasaran dan pada akhirnya akan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, dan disisi lain akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Terdapat berbagai ukuran dalam mengukur kemiskinan, kemiskinan tentunya diukur berdasarkan beberapa kriteria, sehingga dari kriteria tersebut muncul penduduk yang masuk dalam kategori miskin. Kemiskinan juga dapat diukur dengan menggunakan Rasio Kebutuhan Fisik Minimum (R-KFM), menurut Zulkifli Husin 1993 (dalam Supriatna 2000:124-125), yang disebut dengan rasio kebutuhan fisik minimum yang ditetapkan berdasarkan kondisi sekarang. Dalam hal ini rasio kebutuhan fisik minimum meliputi kebutuhan hidup dengan komposisi empat sehat lima sempurna sebesar Rp 2.500,- perkapita sehari, sehingga berdasarkan hal tersebut besarnya kebutuhan fisik minimum perbulan dapat ditentukan, dengan demikian kebutuhan fisik minimum perbulan adalah sebesar 2.500,- X 30 hari yaitu sebesar Rp 75.000, kebutuhan fisik minimum untuk setiap tahunnya adalah sebesar Rp 2.500,- X 365 hari yaitu sebesar Rp 912.500. Penduduk dikatakan miskin atau tidak dapat dilihat berdasarkan kebutuhan fisik minimum per kapita per tahun digunakan sebagai pembagi, ketika R-KFM bernilai 1 maka penduduk masuk dalam kategori penduduk miskin, hal ini dikarenakan pendapatan yang diperoleh penduduk miskin hanya dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya saja, dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sekunder bahkan tersier. Rasio Kebutuhan Fisik Minimum memiliki penggolongan kemiskinan sebagai berikut:

- a. Miskin sekali jika R-KFM < 0,75
- b. Miskin jika R-KFM berkisar antara 0,76-1,00
- c. Nyaris miskin jika R-KFM berkisar antara 1,01-1,50
- d. Nyaris kaya jika R-KFM berkisar antara 1,51-2,00

Menurut (Haughton dan Khandker, 2012:73) untuk mengukur tingkat kemiskinan juga dapat dilakukan menggunakan *headcount index* yaitu ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dapat dilakukan dengan cara mengukur penduduk yang dianggap sebagai masyarakat miskin, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$P_0 = \frac{N_p}{N}$$

Keterangan:

P_0 = Total penduduk yang dianggap miskin.

N_p = Jumlah masyarakat miskin.

N = Total populasi (atau sampel).

Kemiskinan terjadi disebabkan tidak hanya dari segi ekonomi saja namun juga dari aspek non ekonomi. kemiskinan juga terjadi karena ketidakikutsertaan masyarakat dalam perubahan struktur ekonomi yang ada. Tidak berpartisipasi masyarakat terhadap transformasi bidang ekonomi disebabkan karena masyarakat tidak memiliki faktor produksi yang memadai termasuk sumber daya manusia yang kurang berkualitas, sehingga juga berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas masyarakat, implikasi atas hal tersebut maka masyarakat tidak dapat menikmati hasil-hasil pembangunan sehingga masyarakat menjadi miskin (Arsyad, 1992:189-190).

Menurut Supriatna (2000:70), penyebab kemiskinan juga dipengaruhi oleh aspek demografi atau kependudukan, aspek demografi dapat ditinjau dari sisi tingginya angka rata-rata kelahiran dan kematian, rendahnya tingkat pendapatan perkapita dan standar gizi untuk keluarga, rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh, rendahnya tingkat konsumsi, adanya overload sehingga mengakibatkan terciptanya perkampungan kumuh, kurang memadainya sarana transportasi, kurangnya air bersih, kurangnya fasilitas kesehatan yang bisa dinikmati, dan fasilitas umum lainnya.

Kemiskinan merupakan suatu masalah yang dialami di banyak negara khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, kemiskinan identik dengan rendahnya kepemilikan modal. Dalam hal ini kemiskinan merupakan masalah yang terkait dengan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah menyebabkan tingkat

produktivitas juga menjadi rendah, hal ini dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai faktor utama yang mengelola faktor-faktor produksi yang lain untuk meningkatkan nilai guna suatu barang, ketika sumber daya manusia memiliki kualitas yang rendah maka produktivitas yang dimilikinya juga rendah, rendahnya produktivitas menyebabkan upah yang mereka terima juga semakin rendah, rendahnya upah menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima, sehingga berimplikasi terhadap daya beli masyarakat dan tingkat konsumsi masyarakat juga menjadi rendah. Dengan rendahnya tingkat konsumsi masyarakat maka tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi, bahkan kebutuhan dasar hidup (*basic needs*) belum terpenuhi sehingga akan menimbulkan kemiskinan.

Kuncoro yang mengutip pendapat Sharp (1999 dalam Suartha, 2013), mengemukakan penyebab terjadinya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan terjadi dikarenakan kurang meratanya kepemilikan faktor-faktor produksi, sehingga terdapat golongan masyarakat yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak daripada golongan masyarakat yang lain, sehingga hal ini memicu terjadinya ketimpangan antar masyarakat.
2. Kemiskinan juga disebabkan karena sumber daya manusia yang rendah. Rendahnya sumber daya manusia menyebabkan produktivitas masyarakat menjadi rendah sehingga upah yang diperoleh juga menjadi rendah yang diikuti dengan rendahnya daya beli masyarakat. Kualitas sumber daya manusia yang rendah merupakan hubungan sebab akibat karena rendahnya tingkat pendidikan.
3. Kemiskinan disebabkan karena adanya perbedaan akses dalam hal modal, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat miskin mobilitas dalam menerima modal lebih sedikit, sehingga mereka kurang dapat mengembangkan modal tersebut untuk melakukan hal yang lebih produktif.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai hubungan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) banyak dilakukan oleh ahli yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan menyusun strategi penanggulangan kemiskinan agar kesejahteraan dapat tercapai. Penelitian acuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Triana Wulandari (2018) yang berjudul “Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016” yang menggunakan metode analisis regresi data panel dengan data time series dari tahun 2010-2016 hasil dari penelitian ini adalah secara bersama-sama variabel PDRB,

Pengangguran dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan secara parsial menunjukkan bahwa PDRB dan pengangguran berpengaruh signifikan sedangkan upah minimum berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Ineke Dwi Kartika Sari (2017) yang berjudul “*Pengaruh Investasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa Tahun 2010-2015*”, metode yang digunakan adalah metode data panel dengan pendekatan *fixed effect* dengan *random effect* hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sedangkan hasil analisis dengan menggunakan uji parsial menunjukkan bahwa penanaman modal dalam negeri dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, sedangkan penanaman modal asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa.

Adapun referensi penelitian dari jurnal internasional adalah sebagai berikut, penelitian pertama dilakukan oleh Ben Westmore (2018) yang berjudul “*Do Government Transfers Reduce Poverty In China? Micro Evidence From Five Regions*”, yang menggunakan metode Panel Least Square, hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan efek signifikan negative terhadap pengentasan kemiskinan di 5 Provinsi di China. Penelitian kedua dilakukan oleh Viviane de Senna, Adriano Mendonca Souza (2016) dengan judul “*Assesment Of The Relationship Of Government Spending On Social Assistance Programs With Brazilian Macroeconomic Variables*”, metode yang digunakan adalah *Ordinary Least Squares (OLS)*, *Granger Causality Test*, *Vector Auto Regression Model (VAR)*, hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara variabel makroekonomi dengan pengeluaran pemerintah yakni dalam hal ini adalah bantuan sosial. Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Edward Anderson, Maria Ana Jalles d’Orey, Maren Duvendack, Lucio Esposito (2018) yang berjudul “*Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis*”, dengan menggunakan metode analisis meta regresi, hasil dari penelitian ini adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah akan mengurangi kemiskinan pendapatan di negara-negara berkembang, dalam hal ini terdapat hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan di negara Sub Sahara Afrika. Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Yazid Dissou, Selma Didic, Tatsiana Yakutsava (2016) yang berjudul “*Government Spending on education, human capital accumulation, and growth*”, dengan menggunakan metode *general*

equilibrium model, hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan pada dampak pertumbuhan melalui metode pembiayaan dan metode pembiayaan non distorsi dalam hal ini memberikan peningkatan output tertinggi melalui modal manusia. Penelitian kelima dilakukan oleh Francois Facchini, Elena Seghezza (2018) yang berjudul “*Public Spending Structure, Minimal State and Economic Growth In France (1870-2010)*”, yang menggunakan metode ARDL, hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah berkontribusi pada pertumbuhan output di Perancis, selain itu belanja sosial di tingkat daerah yakni (pengeluaran kesehatan) berkontribusi terhadap pertumbuhan output. Penelitian keenam dilakukan oleh Hong Sang Jung, Erik Thorbecke (2001) yang berjudul “*The Impact Of Public Education Expenditure on Human Capital, Growth, and Poverty in Tanzania and Zambia: A General Equilibrium Approach*”, menggunakan metode CGE model, hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, untuk memaksimalkannya diperlukan investasi fisik yang cukup tinggi, dalam hal ini pengeluaran pendidikan yang tepat sasaran efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Penelitian ketujuh adalah penelitian yang dilakukan oleh Shih Ying Wu, Jenn Hong Tang, Eric S. Lin (2010) yang berjudul “*The Impact Of Government Expenditure On Economic Growth: How Sensitive To The Level Of Development?*”, dengan menggunakan panel granger causality dan hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian kedelapan dilakukan oleh Loyce V. Omari, Willy Muturi (2016) dengan judul penelitian “*The Effect Of Government Sectoral Expenditure On Poverty Level in Kenya*”, penelitian ini menggunakan metode *vector error correction*, hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan sektoral antara kemiskinan dan pengeluaran pemerintah di Kenya, dalam hal ini pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sementara pengeluaran untuk infrastruktur berpengaruh negative terhadap kemiskinan sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian kesembilan dilakukan oleh Biswajit Maltra and C.K Mukhopadhyay (2012) dengan judul penelitian “*Public Spending on Education, Health Care And Economic Growth In Selected Countries Of Asia And The Pacific*”, penelitian ini menggunakan metode *vector error correction* dan hasil dari penelitian ini adalah belanja public di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 12 negara di Asia dan Pasifik selama tiga decade terakhir. Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Uzochukwu Amakom, Nnamdi Azikiwe (2013) dengan judul “*Public Spending and Poverty Reduction in Nigeria: A Benefit Incidence Analysis in*

Education and Health”, penelitian ini menggunakan metode *Benefit Incidence Analysis* (BIA), hasil dari penelitian ini adalah pendidikan dasar dan fasilitas kesehatan secara absolute lebih pro terhadap masyarakat miskin daripada pendidikan tinggi dan fasilitas kesehatan dan redistribusi pendapatan dilakukan melalui subsidi. Penelitian kesebelas dilakukan oleh Nabil Annabi, Simon Harvey, and Yu Lan (2007) dengan judul penelitian “*Public Expenditures on Education, Human Capital and Growth in Canada: An OLG Model Analysis*”, metode yang digunakan adalah *Overlapping Generations Model (OLG)* dan hasil dari penelitian ini adalah belanja public di sektor pendidikan meningkatkan akumulasi sumber daya manusia dan efektif bagi peningkatan skill, dalam jangka pendek belanja public dibidang pendidikan yang dibiayai oleh pajak memiliki efek yang signifikan namun dalam jangka panjang dapat meningkatkan akumulasi modal manusia yang dapat mengurangi efek negative dari populasi manusia. Penelitian kedua belas dilakukan oleh Herman Musahara (2004) yang berjudul “*Poverty And Government Expenditure: An assessment of the impact of government expenditure and interventions on poor groups with a focus on Rwanda*”, yang menggunakan metode descriptive kualitatif dan hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah untuk subsidi penduduk miskin lebih dari 90% diberikan kepada yang tidak miskin sehingga tidak tepat sasaran selain itu kebijakan pengeluaran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masih statis dan terlalu lemah untuk memenuhi persyaratan pertumbuhan. Penelitian ketiga belas adalah penelitian yang dilakukan oleh Adi Widodo, Waridin, Johanna Maria K (2011) dengan judul penelitian “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah*”, yang menggunakan metode analisis regresi berganda dengan variabel moderating, hasil dari penelitian ini adalah peningkatan belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan diikuti meningkatnya IPM dan penurunan prosentase penduduk miskin, serta pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengentasan kemiskinan diperkuat oleh peran IPM sehingga pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak secara langsung mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin. Penelitian keempat belas dilakukan oleh Naylal Fithri, David Kaluge dengan judul penelitian “*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur*”, metode yang digunakan adalah regresi data panel, hasil dari penelitian ini adalah Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan pemerintah masih kurang efektif dalam upaya menurunkan

jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa. Penelitian kelimabelas dilakukan oleh Ngakan Made Agung Aditia, Ni Putu Martini Dewi (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali” yang menggunakan metode regresi linier berganda, hasil dari penelitian ini adalah secara simultan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2010-2015, dan secara parsial pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2010-2015, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2010-2015, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali tahun 2010-2015. Penelitian ke enam belas dilakukan oleh Rahmah Amalia, Madris, Abd. Rahman Razak (2015) dengan judul penelitian ”Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Barat”, yang menggunakan metode SEM (*Structural Equation Modeling*, hasil dari penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah kabupaten secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan tetapi secara tidak langsung dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Pengeluaran provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Pengaruh pengeluaran pemerintah pusat terhadap kemiskinan secara langsung berpengaruh negative dan tidak signifikan secara tidak langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.

Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian ini:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Edward Anderson, Maria Ana Jalles d'Orey, Maren Duvendack, Lucio Esposito (2018)	<i>Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis</i>	<i>Government Spending, Income Poverty</i>	<i>Meta Regression Analysis</i>	Pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi memainkan peranan penting dalam mengurangi kemiskinan pendapatan di negara-negara berkembang. Terjadi hubungan yang kurang negative antara pengeluaran pemerintah dan kemiskinan di negara di Sub- Sahara Afrika, lebih negatif untuk negara-negara di Eropa Timur dan Asia tengah
2.	Hong Sang Jung, Erik Thorbecke (2001)	<i>The Impact Of Public Education Expenditure on Human Capital, Growth, and Poverty in Tanzania and Zambia: A General Equilibrium Approach</i>	<i>Government expenditure on Education and Human Capital, Growth, Poverty</i>	<i>CGE Model</i>	Pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun untuk memaksimalkan manfaat dari pengeluaran pendidikan diperlukan investasi fisik yang cukup tinggi. Dan pengeluaran pendidikan yang tepat sasaran dapat efektif untuk mengentaskan kemiskinan.
3.	Loyce V. Omari, Willy Muturi (2016)	<i>The Effect Of Government Sectoral Expenditure On Poverty Level in Kenya</i>	<i>Government Expenditure on education, healthy, agriculture sectore expenditure, infreastructure sectore expenditure, Poverty</i>	<i>Vector Error Correction</i>	Terdapat hubungan sektoral antara kemiskinan dan pengeluaran pemerintah di Kenya. Pengeluaran pemerintah di sektor pertanian dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan sementara belanja sektor infrastruktur memiliki pengaruh negatif dan signifikan pada tingkat kemiskinan sedangkan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap kemiskinan tidak signifikan. Sehingga direkomendasikan agar pemerintah di kenya meningkatkan alokasi pengeluaran untuk sektor pertanian dan kesehatan
4.	Biswajit Maltra and C.K Mukhopadhayay	<i>Public Spending on Education, Health Care And</i>	<i>Public spending on education and health, Economic</i>	<i>VEctoe Error Correction (VEC)</i>	Belanja public di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif terhadap produk domestic bruto (PDB) dari 12 negara di Asia dan Pasifik selama 3

	(2012)	<i>Economic Growth In Selected Countries Of Asia And The Pacific</i>	<i>Growth (GDP)</i>		dekade terakhir. Di negara Bangladesh, Kiribati, Malaysia, Maldives, Filipina, dan Republik Korea berdasarkan tes kointegrasi Johansen maka terdapat hubungan kointegrasi. Namun untuk Negara Fiji, Nepal, Singapura, Sri Lanka, Tonga dan Vanuatu tidak ada hubungan kointegrasi. Kemudian Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dapat meningkatkan GDP di Bangladesh, Fiji, Kiribati, Maladewa, Nepal, Singapura, Srilanka, Tonga dan Vanuatu, disisi lain belanja perawatan kesehatan berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB di Indonesia, Bangladesh, Nepal, Filiphina, Singapura dan Sri Lanka., Di Singapura pengeluaran public untuk pendidikan memiliki dampak negative terhadap PDB sedangkan di Kiribati, Maladewa, dan Vanuatu pengeluaran kesehatan memiliki dampak negative terhadap GDP. Sementara itu di Malaysia, Republik Korea baik pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan maupun kesehatan tidak memiliki dampak yang cukup besar terhadap PDB.
5.	Adi Widodo, Waridin, Johanna Maria K (2011)	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa	Belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, IPM dan tingkat kemiskinan	Analisis Regresi Berganda dengan Variabel Moderating (<i>Moderated Regression Analysis (MRA)</i>)	Secara umum pada tahun 2007 dan 2008 pola pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, IPM dan jumlah orang miskin menunjukkan tren positif artinya peningkatan belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan diikuti meningkatnya IPM dan penurunan prosentase penduduk miskin. Dalam hal ini hubungan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan dan pengentasan kemiskinan diperkuat oleh peran IPM sehingga pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak secara langsung mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin.

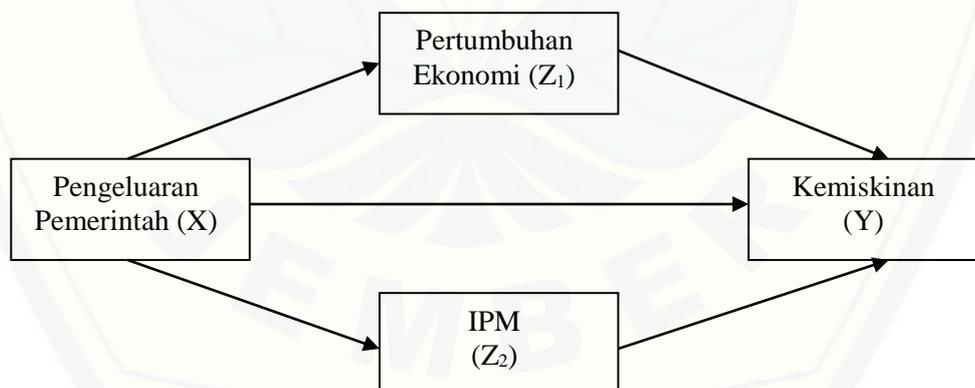
		Tengah			
6.	Naylal Fithri, David Kaluge	Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur	Jumlah Penduduk miskin, Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan	Regresi Data Panel	Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan pemerintah masih kurang efektif dalam upaya menurunkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan adanya kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dari masa ke masa.
7.	Ngakan Made Agung Aditia, Ni Putu Martini Dewi (2018)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali	Kesejahteraan masyarakat dengan indicator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengeluaran pemerintah bidang ekonomi, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan	Regresi Linier Berganda	Secara simultan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2010-2015. Secara parsial pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2010-2015, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2010-2015, pengeluaran pemerintah bidang ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali tahun 2010-2015.
8.	Rahmah Amalia, Madris, Abd. Rahman Razak (2015)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di	Pengeluaran pemerintah dalam bentuk belanja langsung di bidang	SEM (<i>Structural Equation Modeling</i>)	Pengeluaran pemerintah kabupaten secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan tetapi secara tidak langsung dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Pengeluaran provinsi baik secara

		Provinsi Sulawesi Barat	pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan tingkat kemiskinan		langsung maupun tidak langsung berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat. Pengaruh pengeluaran pemerintah pusat terhadap kemiskinan secara langsung berpengaruh negative dan tidak signifikan secara tidak langsung berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Barat.
9.	Miar dan Ahmad Yunani (2020)	<i>The Analysis of Influence of The Government Expenditure on Poverty in Indonesia</i>	<i>Government Expenditure, Economic Growth, Poverty</i>	<i>Path Analysis</i>	Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.
10	Ginting, R.R., Ramli, Afifuddin, S. and Zulfendri (2019)	<i>Path analysis on economy, human development index and poverty in Indonesia</i>	<i>Health Government Expenditures Economic Growth, HDI and Poverty</i>	<i>Path Analysis</i>	Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan melalui Pertumbuhan Ekonomi dan IPM sebagai Variabel Intervening. Pengeluaran Pemerintah untuk Kesehatan tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi dan IPM sebagai variabel intervening.

Mengacu pada tabel di atas, maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian terletak pada tema penelitian mengenai kemiskinan dan penggunaan variabel pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, dan IPM, serta penggunaan analisis jalur atau path analysis (pada beberapa penelitian). Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada penggunaan objek penelitian, serta penggunaan variabel dan periode penelitian. Alat analisis yang digunakan juga menjadi hal yang membedakan, dimana dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur, sedangkan beberapa penelitian di atas menggunakan *Meta Regression Analysis*, *CGE Model*, *Vector Error Correction (VEC)*, Analisis Regresi Berganda dengan Variabel Moderating (*Moderated Regression Analysis (MRA)*), Regresi Data Panel, serta SEM (*Structural Equation Modeling*).

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur berfikir yang tertuang secara konseptual, Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman dalam proses penelitian, yang diturunkan dari teori yang mendasari penelitian maupun secara empiris, kemudian dituangkan dalam variabel-variabel terkait dengan penelitian, setelah itu dilakukan perumusan alur berfikir secara konseptual mengenai penelitian yang dilakukan. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat ditunjukkan pada bagan berikut.



Gambar 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menyatakan bahwa kemiskinan merupakan masalah yang tidak berujung pangkal yang bersifat kompleks dan multidimensional. Penanganan kemiskinan harus memperhatikan profil penduduk miskin agar lebih tepat sasaran. Masalah kemiskinan berdasarkan Teori Lingkaran Setan Kemiskinan atau (*Vicious Circle Poverty*) yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse dapat ditangani dengan peningkatan

mutu modal manusia, dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui tujuan tersebut pemerintah memiliki kewajiban yang dituangkan dalam pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan mutu modal manusia maka aspek terkait harus ditingkatkan adalah aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah memberikan intervensi dengan melakukan pengeluaran pemerintah untuk membiayai peningkatan fasilitas pendidikan, kesehatan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yakni agar memiliki skill, wawasan, keterampilan yang lebih luas. Pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga kualitas kesehatan meningkat dan kebutuhan kesehatan masyarakat dapat terpenuhi sehingga akan menjamin pemerataan fasilitas kesehatan masyarakat. Selain itu adanya pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi diharapkan dapat mendukung dan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga akan berimplikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas mutu modal manusia yang diwujudkan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didalamnya terdapat aspek pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat. Pemerintah dalam hal ini mengeluarkan biaya yang diwujudkan dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang dialokasikan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang akan berimplikasi pada peningkatan mutu modal manusia, seiring dengan peningkatan mutu modal manusia akan terjadi peningkatan produktivitas kerja sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat karena dengan meningkatnya pendidikan maka wawasan, skill, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja akan semakin meningkat. Disisi lain dengan meningkatnya kualitas kesehatan maka tenaga kerja juga memiliki tubuh yang sehat sehingga akan dapat menunjang kinerja mereka akan semakin baik dan produktivitas juga meningkat. Dengan meningkatnya produktivitas kerja maka akan diimbangi dengan peningkatan pendapatan sehingga akan berimplikasi pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sehingga kemiskinan juga akan berkurang. Dampak lain yang ditimbulkan akibat penurunan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat adalah terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena semakin meningkatnya daya beli masyarakat maka kegiatan ekonomi akan semakin meningkat sebagai dampak permintaan agregat juga meningkat sehingga memicu munculnya usaha-usaha baru dan penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak sehingga pengangguran

juga berkurang. Semakin banyak masyarakat yang bekerja maka mereka menerima pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan kemiskinan akan semakin berkurang, disisi lain akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan diimbangi dengan pembangunan ekonomi, melalui pembangunan ekonomi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi akan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan dugaan sementara mengenai suatu penelitian yang perlu dilakukan pengujian kembali mengenai kebenarannya yang dilakukan melalui pengujian hipotesis dan melakukan penelitian lanjutan. Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengeluaran pemerintah biasanya mencerminkan kebijakan pemerintah dalam penentuan anggarannya. Dalam perekonomian modern, Pemerintah sebagai pelaku ekonomi memiliki peranan penting dalam mengatur, mengawasi perekonomian, pemerintah juga mampu melaksanakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku ekonomi lainnya baik swasta maupun rumah tangga (Hidayat, 2010). Untuk itulah diperlukan campur tangan pemerintah dibutuhkan dalam satu perekonomian dan hanya untuk kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebijakan pengeluaran pemerintah yang secara langsung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah belanja karena variabel ini diwujudkan pembangunan prasarana ekonomi dan sosial. Perkembangan pengeluaran pemerintah yang diukur dari besarnya belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2008).

Terkait dengan dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan dan investasi, sebenarnya ada dua pandangan yang berkembang. Pandangan tradisional menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat menghambat investasi, karena peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, menaikkan suku bunga

yang sekaligus berarti menaikkan biaya modal, sehingga akan terjadi efek pendesakan pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta (*crowding-out effect*), yang pada akhirnya menurunkan investasi dan sekaligus menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pandangan ini mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah mendesak keluar investasi sektor privat. Dengan kata lain, pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi yang dibiayai oleh pajak atau pinjaman, akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa, meningkatkan tingkat bunga, membuat harga modal menjadi lebih mahal, dan pada akhirnya menurunkan atau mengurangi investasi sektor swasta. Pandangan kedua dinamakan oleh Ahmed dan Miller sebagai pandangan non-tradisional, yaitu suatu pandangan yang menganggap pengeluaran pemerintah justru akan mendorong investasi. Hal ini terutama terjadi di negara berkembang, karena pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan infrastruktur (misalnya infrastruktur transportasi dan komunikasi) akan merangsang investor untuk menanamkan modalnya. Pengeluaran pemerintah akan menjadi stimulus bagi investasi swasta. Pendesakan ke dalam (*crowding in*) daripada investasi swasta tersebut terjadi ketika sumber daya ekonomi berada dibawah *full employment* (*under employment*). Hal ini terjadi terutama di negara-negara yang sedang berkembang, sebagai contoh ketika terjadi peningkatan pengeluaran pemerintah terhadap infrastruktur justru merangsang investasi. Mengenai pandangan yang pertama terjadi di negara maju dan berkembang. Sedangkan pandangan yang kedua terjadi hanya di negara berkembang. Ahmed dan Miller merujuk kajian yang dilakukan oleh Barro (1990) yang melihat pengaruh pengeluaran pemerintah yang dibiayai oleh pajak terhadap investasi dan output. Hasilnya menunjukkan bahwa pajak pendapatan yang lebih tinggi mengurangi pendapatan (*return*) setelah pajak dari investasi sektor swasta, dan selanjutnya berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Barro membagi pengeluaran pemerintah yang dibiayai pajak tersebut ke dalam dua kategori yaitu pengeluaran untuk sektor *unproductive* (*consumption*) *services* (seperti pemberian subsidi makanan) dan pengeluaran pemerintah untuk sektor *productive* (seperti pembangunan infrastruktur). Atas dasar pembagian tersebut ditemukan bahwa pembiayaan untuk sektor *unproductive* (*consumption*) berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan, sedangkan pengeluaran untuk sektor *productive* berpengaruh positif.

H₁: Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

2.4.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap dengan tetap

mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. IPM dapat diwujudkan melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standard belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kuncoro, 2013).

Investasi dalam hal pendidikan mutlak dibutuhkan maka pemerintah harus dapat membangun suatu sarana dan sistem pendidikan yang baik. Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan merupakan wujud nyata dari investasi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengeluaran pembangunan pada sektor pembangunan dapat dialokasikan untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan menyelenggarakan pelayanan pendidikan kepada seluruh penduduk Indonesia secara merata. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN merupakan wujud realisasi pemerintah untuk meningkatkan pendidikan (Wahid, 2012). Pengeluaran pemerintah berupa dana investasi untuk pembangunan bidang pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan sumberdaya manusia yang tidak bisa dilihat secara langsung perkembangannya adalah untuk bidang pendidikan. Output dari investasi ini sebagian bisa dilihat bentuk fisiknya berupa gedung-gedung sekolah dan berbagai fasilitas pendukungnya, tetapi tingkat perkembangan yang dicapai anak didik dalam proses pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya memang tidak bisa dilihat bentuk fisiknya. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat fundamental bagi perkembangan sebuah negara. Banyak ahli mengemukakan bahwa bidang pendidikan menjadi faktor penentu kualitas sumberdaya manusia yang kemudian akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di suatu negara (Kest, 2005). Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan di sektor pendidikan yaitu dengan meningkatnya jumlah murid yang mampu menyelesaikan sekolahnya sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu dalam usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan untuk mencapai pembangunan.

H₂: Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur.

2.4.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Kemiskinan menurut Kuncoro (2000) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standard hidup minimum. Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit (kemiskinan), perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standard hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator antara lain *Gross National Product (GNP) per capita*, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Mahmudi (2007), dalam suatu lingkaran setan kemiskinan terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin yaitu 1) rendahnya tingkat kesehatan, 2) rendahnya pendapatan, dan 3) rendahnya tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat kesehatan merupakan salah satu pemicu terjadinya kemiskinan karena tingkat kesehatan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah lebih lanjut menyebabkan pendapatan rendah, dan pendapatan yang rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan. Kemiskinan itu selanjutnya menyebabkan seseorang tidak dapat menjangkau pendidikan yang berkualitas serta membayar biaya pemeliharaan dan perawatan kesehatan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia sangat besar diharapkan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan laju investasi, kesempatan kerja memelihara kestabilan ekonomi dan menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Teori makro mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses dan persentase investasi pemerintah terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial, seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan dan sebagainya. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Investasi pemerintah untuk pembangunan manusia, baik itu di bidang pendidikan dan kesehatan ataupun bidang lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik, merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Meningkatnya kesehatan dan pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja, dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan anggota masyarakat. Menurut Salim (2007), pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan suatu kebijakan yang *pro poor* yang mempunyai dampak yang negatif terhadap kemiskinan melalui dampaknya terhadap pertumbuhan dan pemerataan. Semakin besarnya alokasi anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang mendapat akses atas pendidikan dan kesehatan. Seperti yang disebutkan oleh Sen (1985), bahwa masalah kemiskinan tidak hanya masalah *income* semata melainkan terkait dengan kapabilitas-kapabilitas yang harus dimiliki oleh seseorang dalam hal ini salah satunya menyangkut masalah akses-akses, baik terhadap pendidikan, kesehatan dan kesempatan kerja. Dengan demikian penanganan kemiskinan akan lebih komprehensif.

H₃: Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

2.4.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan adalah hubungan yang kompleks dan kontroversial. Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah prakondisi bagi pengurangan kemiskinan. Namun ini tidaklah cukup, berbagai studi telah mencoba menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan yang secara metodologi dapat dikelompokkan menjadi dua (Berardi dan Marzo, 2015). Kelompok pertama berfokus pada hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan. Bentuk dari hubungan kemiskinan dengan perekonomian secara mikro dimana pertumbuhan pendapatan dan distribusi pendapatan menjadi indikator dari perekonomian mikro, sedangkan kelompok kedua berfokus pada elastisitas kemiskinan terhadap PDB yang merupakan indikator dari perekonomian secara makro. Dalam hal ini, struktur ekonomi adalah elemen penting yang menentukan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Salah satu indikator penting yang selalu digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah laju pertumbuhan ekonomi dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menilai kinerja perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting karena dengan pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuka lebih banyak lapangan kerja dan akan berdampak terhadap kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pengurangan kemiskinan bukanlah hal yang saling bertentangan, tetapi harus dilaksanakan secara simultan. Berbagai kebijakan pembangunan ekonomi seharusnya dirumuskan agar seluruh elemen penduduk dapat berperan serta dalam proses pertumbuhan ekonomi termasuk penduduk miskin. Peningkatan peran serta penduduk miskin dapat dilakukan dengan lebih memberdayakan penduduk miskin melalui perbaikan sumber daya manusia (pendidikan dan kesehatan) dan peningkatan akses terhadap sumber daya faktor produksi. Pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang (Tambunan, 2011).

H₄: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

2.4.5 Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Kualitas sumber daya manusia dapat menjadi faktor penyebab utama terjadinya kemiskinan. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut Mudrajad (2006) IPM bermanfaat untuk membandingkan kinerja pembangunan manusia baik antar negara maupun antardaerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan yang baik, peningkatan produktivitas masyarakat akan meningkatkan pula pengeluaran untuk konsumsinya, ketika pengeluaran untuk konsumsi meningkat, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Disisi lain, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Rendahnya produktivitas berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Sehingga dengan rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011).

Masalah besar dalam pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*). Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Mengacu pada isi dokumen strategi nasional penanggulangan kemiskinan (SNPK), bahwa pemerintah Indonesia menetapkan sembilan sektor kebijakan pembangunan dengan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama. Target penanggulangan kemiskinan adalah dengan langkah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat

terutama kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam konteks pengembangan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), pembangunan manusia (*human development*) dan pengurangan kemiskinan (*poverty reduction*).

Salah satu sumber yang menyebabkan pengaruh jumlah penduduk miskin salah satunya adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu terobosan dalam menilai pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit atau gabungan dari beberapa indikator yang walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Ketiga kemampuan dasar itu adalah umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP, 1995). Titik berat pembangunan nasional Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep tersebut, yakni konsep pembangunan manusia seutuhnya yang menghendaki peningkatan kualitas hidup penduduk secara fisik, mental maupun spiritual (Setiawan dan Hakim, 2003).

Indeks pembangunan manusia adalah salah satu tolok ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut. Karena itu diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat juga tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi, maka seharusnya tingkat kemiskinan rendah. IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan keempat komponen, yaitu angka harapan hidup yang mengukur keberhasilan dalam bidang kesehatan, angka melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah yang mengukur keberhasilan dalam bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mengukur keberhasilan dalam bidang pembangunan hidup yang layak. Peningkatan pada sektor kesehatan dan pendidikan serta pendapatan per kapita memberikan kontribusi bagi pembangunan manusia, sehingga semakin tinggi kualitas manusia pada suatu daerah akan mengurangi jumlah penduduk miskin di daerah. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia atau unsure dalam IPM tersebut sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan.

H₅: IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *explanatory*, penelitian *explanatory* merupakan suatu jenis penelitian yang berfungsi guna menjelaskan hubungan atau pengaruh variabel terikat atau *dependent variable* dengan variabel bebas atau *independent variable*, selain itu juga menjelaskan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain yang didalamnya terdapat uji hipotesa (Sigarimbun dan Effendi,1989:4-5). Di dalam penelitian ini memuat beberapa variabel, dalam hal ini variabel bebas berupa pengeluaran pemerintah yakni di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan variabel terikat yakni kemiskinan. Dalam penelitian ini, masyarakat miskin di Jawa Timur adalah sebagai objek penelitian.

3.2 Unit Analisis

Dalam penelitian ini jumlah penduduk miskin di Jawa Timur menjadi sebuah unit analisis. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengeluaran pemerintah baik di bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Variabel intervening pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sedangkan variabel terikat adalah variabel kemiskinan.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian di dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 kabupaten/kota.

3.4 Metode Pengumpulan Data

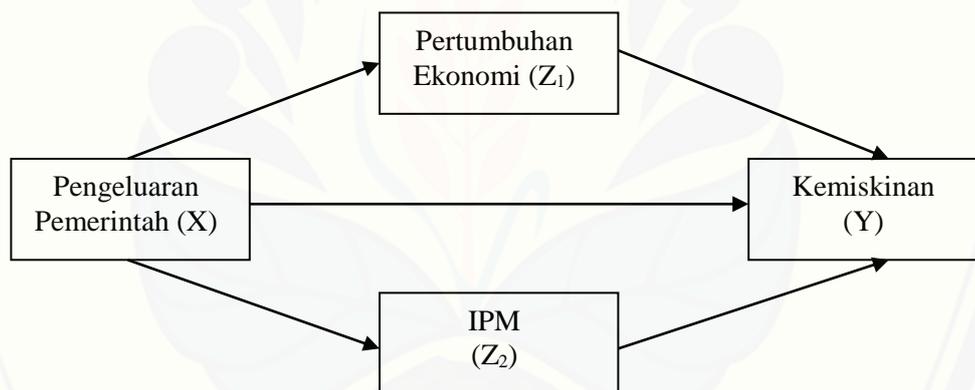
Dalam penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data melalui studi pustaka. Teknis pengumpulan data melalui studi pustaka merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan, literatur, dokumentasi dan lain sebagainya (Permana dan Ariantie, 2012). Selain itu, dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui catatan dari pihak lain atau instansi lain yang penyajiannya dalam bentuk publikasi. Penelitian ini menggunakan data yang dipublikasi oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Departemen Keuangan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa data runtut waktu (time series) mulai

tahun 2015 hingga tahun 2019, selain itu data deret berkala (cross section) yang meliputi 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga data yang dihasilkan adalah sebanyak 190 observasi.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (*path analysis*) yang digunakan untuk menganalisis hubungan kausal antar variabel dan menguji hipotesis penelitian secara sistematis. Analisis jalur (*path analysis*) dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software SPSS*. Model analisis jalur merupakan bagian dari analisis regresi yang digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat (Ridwan dan Kuncoro, 2013: 3). Manfaat *path analysis* adalah perluasan dari persamaan regresi sederhana atau berganda yang diperlukan pada hubungan jalur variabel-variabel yang melibatkan lebih dari satu persamaan.

Adapun model yang diajukan dalam path analysis dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Model Teoritis yang Diusulkan

Sumber: Kajian Teoritis dan Empiris

Koefisien jalur dihitung dengan membuat data persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan hubungan. Dalam hal ini persamaan tersebut adalah :

1. $PE_{it} = \beta_1 PP_{it} + \varepsilon_1$
2. $IPM_{it} = \beta_2 PP_{it} + \varepsilon_2$
3. $KEMISKINAN_{it} = \beta_3 PP_{it} + \beta_4 PE_{it} + \beta_5 IPM_{it} + \varepsilon_3$

3.6 Uji Asumsi Klasik

Setelah memperoleh model persamaan analisis jalur, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa model persamaan yang dikembangkan memiliki sifat BLUE (*Best Linier Unbised Estimator*). Metode ini mempunyai kriteria bahwa pengamatan harus mewakili variasi minimum, konstanta dan efisien. Asumsi BLUE yang harus dipenuhi antara lain, data harus berdistribusi normal, tidak ada multikolineritas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam persamaan model regresi variabel terikat dan variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas, dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dalam pengujian normalitas adalah (Latan, 2013:42).

- a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas adalah pengujian yang dilakukan untuk membuktikan bahwa variabel-variabel bebas dalam suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan lainnya. Terjadinya multikolineritas dapat menyebabkan model regresi yang diperoleh tidak valid untuk menaksir variabel independen. Terjadinya multikolineritas dapat dideteksi dengan melihat besarnya nilai VIF (*Varianve Inflation Factor*). Indikasi terjadinya multikolineritas pada umumnya terjadi jika nilai VIF lebih besar dari 10 (Latan, 2013:61).

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model, dapat dilihat pada pola gambar *scatterplot* pada model tersebut (Latan, 2013:42).

3.7 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh dari variabel pengeluaran pemerintah sebagai variabel bebas (X) terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM sebagai variabel *intervening* (Z) dan kemiskinan sebagai variabel terikat (Y) secara parsial. Rumus yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut.

$$t = \frac{bi}{Se (bi)}$$

Keterangan.

t = test signifikansi dengan angka korelasi

bi = koefisien regresi

Se (bi) = *Standard error* dari koefisien regresi

Untuk menentukan apakah H_0 diterima atau ditolak, maka dibuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1. Apabila signifikansi $< 0,05$, maka H_0 ditolak, yang artinya bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.
2. Apabila signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima, yang artinya bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.

3.8 Definisi Operasional Variabel

- a. Kemiskinan (P) menunjukkan jumlah penduduk miskin yang ada di Jawa Timur, dinyatakan dalam satuan (jiwa/tahun). Kemiskinan dalam penelitian ini dipoksikan dengan kemiskinan absolut, yaitu suatu kondisi ketika seseorang memiliki pendapatan lebih rendah dari standar hidup yang layak, diukur dengan standar garis kemiskinan. Dalam hal ini seseorang dikatakan miskin secara absolut apabila pendapatannya lebih rendah dari garis kemiskinan absolute atau dengan istilah lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan absolut (P1), dinyatakan dalam satuan jiwa/tahun.
- b. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan (GEH) menunjukkan jumlah pengeluaran pemerintah secara keseluruhan yang dialokasikan untuk sektor kesehatan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas fasilitas dan sarana kesehatan masyarakat agar mutu kesehatan masyarakat lebih meningkat, dinyatakan dalam satuan (rupiah/tahun).

- c. Pengeluaran Pemerintah Untuk Pendidikan (GEE) menunjukkan jumlah pengeluaran pemerintah secara keseluruhan yang dialokasikan untuk sektor pendidikan guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas fasilitas dan sarana pendidikan masyarakat agar mutu pendidikan masyarakat lebih meningkat, dinyatakan dalam satuan (rupiah/tahun).
- d. Pengeluaran Pemerintah Untuk Infrastruktur (GEI) menunjukkan jumlah pengeluaran pemerintah secara keseluruhan yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas infrastruktur di masyarakat lebih meningkat, dinyatakan dalam satuan (rupiah/tahun).
- e. Indeks Pembangunan Manusia (HDI) menunjukkan kemudahan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, dalam hal ini menggunakan metode baru dan dinyatakan dalam satuan (persen/tahun).
- f. Pertumbuhan Ekonomi (EG) menunjukkan adanya peningkatan kegiatan perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya produksi barang dan jasa serta diikuti dengan peningkatan taraf hidup dan kemakmuran, dinyatakan dalam satuan (persen/tahun).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Hasil pengujian menunjukkan pengeluaran pemerintah (GEXP) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (EG). Sehingga, hipotesis yang menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tidak terbukti kebenarannya atau H1 ditolak.
2. Hasil pengujian menunjukkan pengeluaran pemerintah (GEXP) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Sehingga, hipotesis yang menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jawa Timur tidak terbukti kebenarannya atau H2 ditolak.
3. Hasil pengujian menunjukkan pengeluaran pemerintah (GEXP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan (P). Sehingga, hipotesis yang menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tidak terbukti kebenarannya atau H3 ditolak.
4. Hasil pengujian menunjukkan pertumbuhan ekonomi (EG) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (P). Sehingga, hipotesis yang menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tidak terbukti kebenarannya atau H4 ditolak.
5. Hasil pengujian menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI) berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan (P). Sehingga, hipotesis yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur terbukti kebenarannya atau H5 diterima.

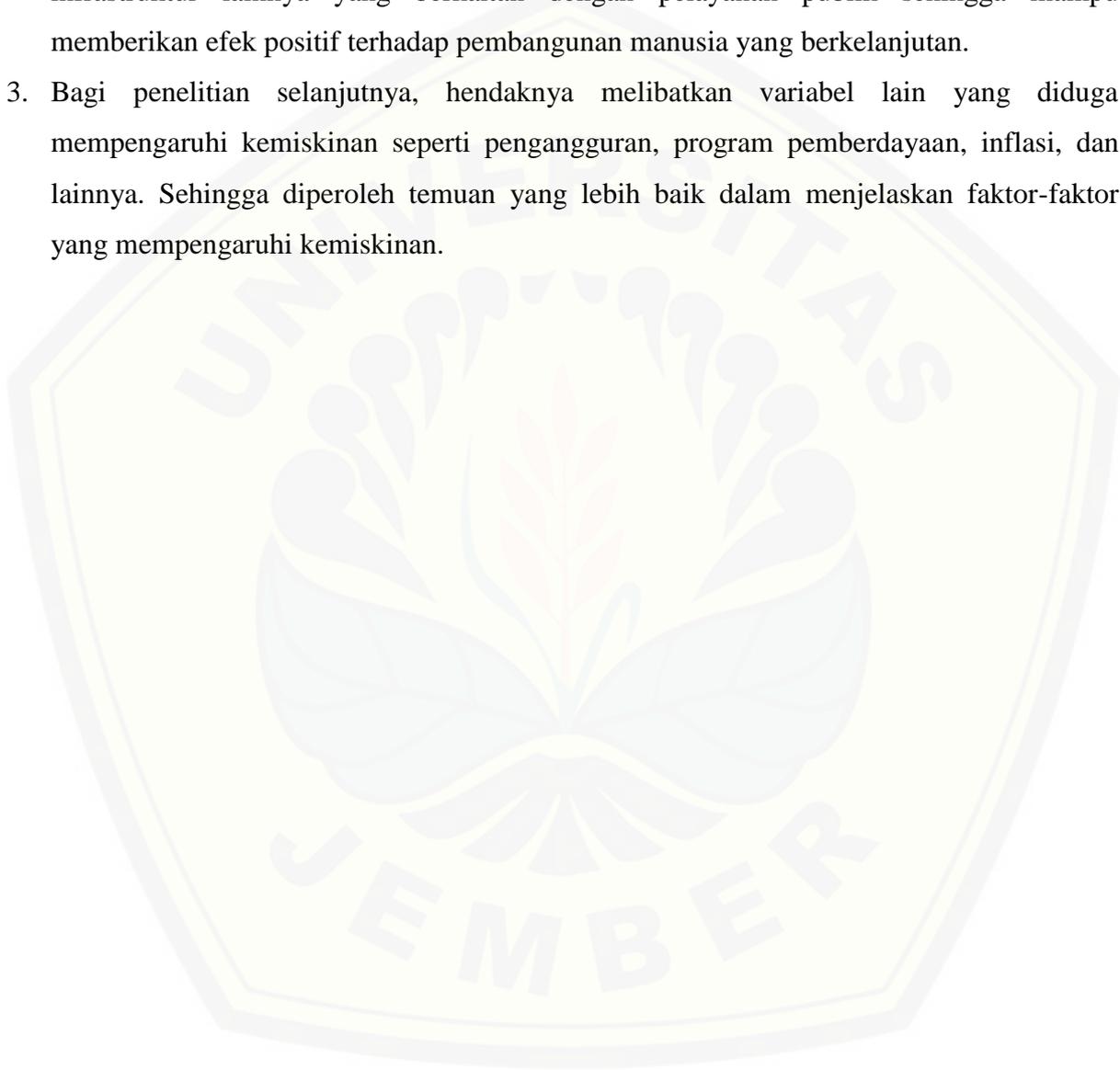
5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini kiranya peneliti dapat memberikan saran, diantaranya:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota disarankan dalam peningkatan IPM melalui pengentasan kemiskinan untuk periode tahun selanjutnya agar tetap mengacu pada program sebelumnya yaitu *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth* namun dengan lebih menekankan pada penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih memadai. Selain itu,

koordinasi diantara *stakeholders* maupun instansi pengampu secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten/kota harus dioptimalkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih maupun terlewatnya sasaran penanggulangan kemiskinan.

2. Pemerintah daerah kabupaten/kota disarankan dapat mempertahankan kemampuan merealisasikan pengalokasian anggaran untuk pengeluaran/belanja pemerintah di tahun-tahun selanjutnya terutama seperti sarana prasarana pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan.
3. Bagi penelitian selanjutnya, hendaknya melibatkan variabel lain yang diduga mempengaruhi kemiskinan seperti pengangguran, program pemberdayaan, inflasi, dan lainnya. Sehingga diperoleh temuan yang lebih baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari. 2009. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Aditia, Ngakan Made Agung dan Dewi, Ni Putu Martini. 2018. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.7, No 2 Februari 2018.
- Annabi, Nabil, Simon Harvey, and Yu Lan. 2007. Public Expenditures on Education, Human Capital and Growth in Canada: An OLG Model Analysis. *Journal of Policy Modeling* 33(6):852-865.
- Anderson, Edward, Maria Ana Jalles d'Orey, Maren Duvendack, Lucio Esposito. 2018. Does Government Spending Affect Income Poverty? A Meta-regression Analysis. *World Development*, 2018, vol. 103, issue C, 60-71.
- Amakom, Uzochukwu, Nnamdi Azikiwe. 2013. Public Spending and Poverty Reduction in Nigeria: A Benefit Incidence Analysis in Education and Health. *AERC Research Paper 254 African Economic Research Consortium*, Nairobi January 2013.
- Arief, Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi 1*: Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia Universitas Indonesia.
- Arsyad, Lincoln. 1992. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Daryanto, Arief & Hafizrianda, Yundy. 2010. *Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Daryanto. 1996. *Kependudukan*. Bandung: Tarsito.
- Delavallade, Clara. 2006. Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries. *Journal of Economics and Finance*.30(2): pp: 222- 239.
- Dissou, Yazid, Selma Didic, Tatsiana Yakutsava. 2016. Government Spending on education, human capital accumulation, and growth. *Economic Modelling*, 2016, vol. 58, issue C, 9-21.
- Djaenuri, Aries. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Jakarta: Indonesia. Ghalia
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Facchini, Francois, Elena Seghezza. 2018. Public Spending Structure, Minimal State and Economic Growth In France (1870-2010). *Economic Modelling, Elsevier*, vol. 72(C), pages 151-164.
- Feriyanto,Nur. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Futurrohmin, Rahmawati. 2011. *Pengaruh PDRB, Harapan Hidup dan Melek Huruf Terhadap Tingkat Kemiskinan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah: Jakarta.
[Repository.uinjkt.ac.id/dispace/bitstream/123456789/509/1/103249-RAHMAWATI_FUTURROHMIN-FEB-PDF](https://repository.uinjkt.ac.id/dispace/bitstream/123456789/509/1/103249-RAHMAWATI_FUTURROHMIN-FEB-PDF). Diakses pada tanggal 1 November 2015 pukul 00.19 WIB.
- Gujarati, Damodar N. & Porter Dawn C. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Buku 1 Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.
- Haughton, Jonathan & Khandker, Shahidur R. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset>
- <http://www1.worldbank.org/publicsector/pe/pfma07/CompositionSpending.pdf>
- <https://core.ac.uk/download/pdf/58912839.pdf>. diakses pada 11 oktober 2018 pukul 11.45 WIB
- <https://economics.ca//2008/papers/0118.pdf> diakses pada 11 oktober 2018 pukul 11. 53 WIB
- <https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2001/wp01106.pdf> diakses pada 11 oktober 2018 pukul 11.59 WIB
- https://www.researchgate.net/publication/322657234_GrowthGovernment_Spending_Nexus_The_Evidence_of_Thailand/download diakses pada 11 oktober 2018 pukul 11.49 WIB
- Iqbal, Vighar Choirul. 2015. Analisis Pengaruh Performa Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember: Jember.
- Jhingan. 2003. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jung, Hong Sang, Erik Thorbecke. 2001. The Impact Of Public Education Expenditure on Human Capital, Growth, and Poverty in Tanzania and Zambia: A General Equilibrium Approach. *IMF Working Papers*. August, 1 2001.
- Kurniawan, Deny. 2008. *Regresi Linier (Linear Regression)*. <http://ineddeni.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2018 pukul 13.21 WIB.
- Kurniawan, Jarot. Dilema Pendidikan dan Pendapatan di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S.l.], july 2016. ISSN 2303-0186.
- Mangkoesebroto, Guritno, 2002. *Ekonomi Publik, Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.
- Mulyono, Sri. 1991. *Statistika Untuk Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia Universitas Indonesia.

- Omari, Loyce V., Willy Muturi. 2016. The Effect Of Government Sectoral Expenditure On Poverty Level in Kenya. *Journal of Economics and Sustainable Development*. Vol 7, No 8 (2016).
- Osinubi TS. 2005. *Urban Poverty In Nigeria : A Case Study Of Agege Area of Lagos State, Nigeria*. www.gdnet.org/fulltext/osinubi.pdf diakses pada 11 oktober 2018 pada 13.30 WIB.
- Permana, Anggit Yoga dan Arianti, Fitri. 2012. *Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2009*. Download.portalgaruda.org/article.php?article=75117&val=4726. Diakses pada tanggal 1 November 2017 pukul 00.33 WIB.
- Premana, Lefiadhi & Marwasta, Djaka. 2016. *Ketimpangan Ekonomi Di Zona Perkotaan Dan Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://media.neliti.com/media/publications/228908-ketimpangan-ekonomi-di-zona-perkotaan-da-b4f73950.pdf>
- Rosadi, Dedi. 2010. *Analisis Ekonometrika & Runtun Waktu terapan Dengan R Aplikasi Untuk Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Sahrah, Alimartus. 2007. *Memberdayakan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kualitas Bangsa*. Pidato Dies Natalis Unwama ke XXI, Yogyakarta.
- Simanjuntak, Payaman. 1998. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofyan. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Suartha, Nyoman. 2013. *Pengaruh Kapasitas Rumah Tangga, Budaya, dan Pemberdayaan Terhadap Sikap Serta Keberdayaan Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Karangasem*. http://www.pps.unud.ac.id/disertasi/pdf_thesis/unud-63-1192095846-disertasi%20wisuda.pdf
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 1995. *Ekonometrik*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia Universitas Indonesia.
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. [http://www.jmpk-online.net/Volume 8/Vol 8 No 03 2005.pdf](http://www.jmpk-online.net/Volume%208/Vol%208%20No%2003%202005.pdf). Diakses tanggal 9 September 2018.
- Todaro, Michael. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi ke-7 (Terjemahan Bahasa Indonesia). Jakarta. PT Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Wardhono, Adhitya. 2004. *Mengenal Ekonometrika Teori dan Aplikasi Edisi Pertama*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.

Westmore, Ben. 2018. Do Government Transfers Reduse Poverty In China? Micro Evidence From Five Regions. *China Economic Review* Volume 51, October 2018, Pages 59-69.

Widodo, Adi, Waridin, Johanna Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1 (1). pp. 1-183.

Wijayanto. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro: Semarang.

Wu, Shih Ying, Jenn Hong Tang, Eric S. Lin. 2010. The Impact Of Government Expenditure On Economic Growth: How Sensitive To The Level Of Development? *Journal of Policy Modeling*, 2010, vol. 32, issue 6, 804-817

Wulandari, Triana. 2018. *Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2016*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember: Jember.

www.bps.go.id

Lampiran 2

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
P	190	6.63	293.74	118.7069	72.76628
HDI	190	58.18	82.22	70.3827	5.31034
EG	190	.08	9.95	5.3631	1.04617
GEXP	190	700.79	9923.99	2200.8963	1247.16554
Valid N (listwise)	190				



Lampiran 3

Hasil Analisis Jalur

**Pengujian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan
Ekonomi (Jalur I)**

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
EG	5.3631	1.04617	190
GEXP	2200.8963	1247.16554	190

Correlations

		EG	GEXP
Pearson Correlation	EG	1.000	.109
	GEXP	.109	1.000
Sig. (1-tailed)	EG	.	.067
	GEXP	.067	.
N	EG	190	190
	GEXP	190	190

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	GEXP ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: EG

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	.109 ^a	.012	.007	1.04271	.012	2.255	1	188	.135

a. Predictors: (Constant), GEXP

b. Dependent Variable: EG

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.452	1	2.452	2.255	.135 ^a
	Residual	204.402	188	1.087		
	Total	206.853	189			

a. Predictors: (Constant), GEXP

b. Dependent Variable: EG

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	5.162	.154		33.576	.000					
	GEXP	9.13E-005	.000	.109	1.502	.135	.109	.109	.109	1.000	1.000

a. Dependent Variable: EG

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	GEXP
1	1	1.871	1.000	.06	.06
	2	.129	3.802	.94	.94

a. Dependent Variable: EG

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	5.2261	6.0684	5.3631	.11390	190
Std. Predicted Value	-1.203	6.193	.000	1.000	190
Standard Error of Predicted Value	.076	.476	.096	.047	190
Adjusted Predicted Value	5.2148	6.0337	5.3614	.11083	190
Residual	-5.23594	4.53888	.00000	1.03995	190
Std. Residual	-5.021	4.353	.000	.997	190
Stud. Residual	-5.037	4.367	.001	1.001	190
Deleted Residual	-5.26843	4.56722	.00170	1.04764	190
Stud. Deleted Residual	-5.401	4.594	-.003	1.032	190
Mahal. Distance	.000	38.347	.995	3.787	190
Cook's Distance	.000	.079	.004	.011	190
Centered Leverage Value	.000	.203	.005	.020	190

a. Dependent Variable: EG

Pengujian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM (Jalur II)

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
HDI	70.3827	5.31034	190
GEXP	2200.8963	1247.16554	190

Correlations

		HDI	GEXP
Pearson Correlation	HDI	1.000	.142
	GEXP	.142	1.000
Sig. (1-tailed)	HDI	.	.025
	GEXP	.025	.
N	HDI	190	190
	GEXP	190	190

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	GEXP ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: HDI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	.142 ^a	.020	.015	5.27043	.020	3.873	1	188	.051

a. Predictors: (Constant), GEXP

b. Dependent Variable: HDI

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	107.592	1	107.592	3.873	.051 ^a
	Residual	5222.150	188	27.777		
	Total	5329.743	189			

a. Predictors: (Constant), GEXP

b. Dependent Variable: HDI

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	69.051	.777		88.857	.000					
	GEXP	.001	.000	.142	1.968	.051	.142	.142	.142	1.000	1.000

a. Dependent Variable: HDI

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	GEXP
1	1	1.871	1.000	.06	.06
	2	.129	3.802	.94	.94

a. Dependent Variable: HDI

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	69.4752	75.0550	70.3827	.75450	190
Std. Predicted Value	-1.203	6.193	.000	1.000	190
Standard Error of Predicted Value	.382	2.405	.486	.238	190
Adjusted Predicted Value	69.3885	73.1715	70.3507	.64330	190
Residual	-11.89061	11.08961	.00000	5.25647	190
Std. Residual	-2.256	2.104	.000	.997	190
Stud. Residual	-2.263	2.113	.003	1.005	190
Deleted Residual	-11.96441	11.18495	.03203	5.33804	190
Stud. Deleted Residual	-2.288	2.133	.004	1.008	190
Mahal. Distance	.000	38.347	.995	3.787	190
Cook's Distance	.000	.307	.008	.029	190
Centered Leverage Value	.000	.203	.005	.020	190

a. Dependent Variable: HDI

Pengujian Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi, dan IPM terhadap Kemiskinan (Jalur III)

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
P	118.7069	72.76628	190
GEXP	2200.8963	1247.16554	190
EG	5.3631	1.04617	190
HDI	70.3827	5.31034	190

Correlations

		P	GEXP	EG	HDI
Pearson Correlation	P	1.000	.490	-.282	-.610
	GEXP	.490	1.000	.109	.142
	EG	-.282	.109	1.000	.429
	HDI	-.610	.142	.429	1.000
Sig. (1-tailed)	P	.	.000	.000	.000
	GEXP	.000	.	.067	.025
	EG	.000	.067	.	.000
	HDI	.000	.025	.000	.
N	P	190	190	190	190
	GEXP	190	190	190	190
	EG	190	190	190	190
	HDI	190	190	190	190

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	HDI, GEXP, EG ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: P

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	.845 ^a	.714	.709	39.25992	.714	154.422	3	186	.000

a. Predictors: (Constant), HDI, GEXP, EG

b. Dependent Variable: P

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	714052.5	3	238017.508	154.422	.000 ^a
	Residual	286689.4	186	1541.341		
	Total	1000742	189			

a. Predictors: (Constant), HDI, GEXP, EG

b. Dependent Variable: P

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	709.456	37.998		18.671	.000					
	GEXP	.034	.002	.591	14.885	.000	.490	.737	.584	.977	1.024
	EG	-4.143	3.026	-.060	-1.369	.173	-.282	-.100	-.054	.814	1.229
	HDI	-9.156	.599	-.668	-15.296	.000	-.610	-.746	-.600	.807	1.239

a. Dependent Variable: P

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions			
				(Constant)	GEXP	EG	HDI
1	1	3.789	1.000	.00	.01	.00	.00
	2	.187	4.505	.00	.98	.01	.00
	3	.022	13.272	.06	.00	.91	.02
	4	.003	38.136	.94	.00	.08	.97

a. Dependent Variable: P

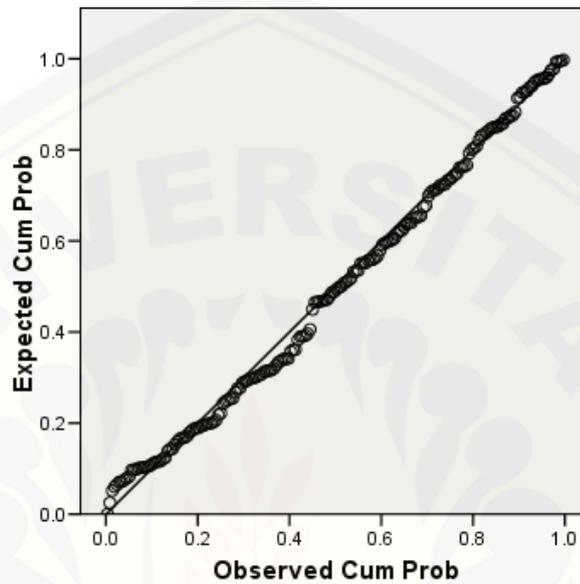
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-16.6030	273.1632	118.7069	61.46589	190
Std. Predicted Value	-2.201	2.513	.000	1.000	190
Standard Error of Predicted Value	2.857	18.384	5.090	2.564	190
Adjusted Predicted Value	-17.4456	313.2154	118.8776	62.17084	190
Residual	-142.613	109.16060	.00000	38.94708	190
Std. Residual	-3.633	2.780	.000	.992	190
Stud. Residual	-4.111	2.793	-.002	1.011	190
Deleted Residual	-182.665	110.11897	-.17062	40.56231	190
Stud. Deleted Residual	-4.300	2.845	-.002	1.019	190
Mahal. Distance	.006	40.446	2.984	5.329	190
Cook's Distance	.000	1.187	.011	.087	190
Centered Leverage Value	.000	.214	.016	.028	190

a. Dependent Variable: P

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: P



Scatterplot

Dependent Variable: P

